

EDISI 49 / 2018

EDUKASI

K E U A N G A N

KALEIDOSKOP 2018

*Manifestasi belajar tanpa batas sebagai wujud
investasi insan Kementerian Keuangan
berkualitas*



Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB Sekretaris BPPK	REDAKTUR Khalimi Andi Manaek Soderi Eko Prasetyo Tri Wibowo Muhammad Irfan Rio Suareski Agus Hekso Pramudijono Hartono Agung Darono Sintawati Kurniawan Inwan Hadiansyah Agus Sunarya R. Adhi Sutanto Eduard Tambunan Pilar Wirotama	EDITOR Sudrajat Ari Sandi Robert Retyan Laksita Mutiary Ardes Martua Sitanggang Yohana Tolla Ridwan Sidik Kurniawan Imam Asma Nur Alam Marbun Bima Lingga Sakti	Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id . Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
PEMIMPIN REDAKSI Sugeng Satoto			
SEKRETARIAT Abdul Aziz Maghfur Dodi Septariza Naseh Iskandar Eko Supriyono Fitria Sri Wulandari		DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER Muhammad Fath Kathin Victorianus M. I. Bimo Adi Seno Adi Nugroho	ALAMAT REDAKSI Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: +62 21 7394666, 7204131 Fax: +62 21 7261775 http://www.bppk.kemenkeu.go.id

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	15
SERAMBI ILMU	18
INFOGRAFIS	42
KUIS	43
TAHUKAH KAMU	44
KOLOM <i>SOFTSKILL</i>	46
CERITA ALUMNI	48
TIPS & TRIK	51
MATA AIR	54
KESEHATAN	56
<i>POINT OF INTEREST</i>	58
RESENSI	61
GALERI	62
KANG EDU	64

FOLLOW US:
@pusdiklatbc

FEBRUARI
JUNI
OKTOBER

3X
SETAHUN

SALAH SATU SYARAT
YANG HARUS DIPENUHI
PENGUSAHA PENGURUSAN
JASA KEPABEANAN
UNTUK MENDAPATKAN
AKSES KEPABEANAN
ADALAH MEMILIKI MINIMAL
1 (SATU) ORANG
AHLI KEPABEANAN

UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

SYARAT PESERTA UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN:

1. BERUSIA MINIMAL 18 TAHUN
2. BERIJAZAH MINIMAL SMA ATAU SEDERAJAT
3. MEMENUHI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
4. MEMBAYAR PNBP SEBESAR RP.1.000.000,-
5. MELAKUKAN PENDAFTARAN SEBAGAI CALON PESERTA SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN



SALAM REDAKSI

Momen pergantian tahun biasanya dimanfaatkan orang untuk melakukan kilas balik atas segala pencapaian yang telah dilakukan sepanjang tahun tersebut. Sebagian melakukannya dengan alasan nostalgia, sebagian lagi melakukannya untuk mengevaluasi pencapaian mereka kemudian membandingkannya dengan resolusi yang dahulu mereka susun di tahun sebelumnya. Dan bisa jadi ada sejumlah alasan lain di belakang kebiasaan yang satu ini. Apapun itu, terkadang kita memang perlu “berhenti” sejenak untuk sekedar melakukan kilas balik.

Untuk itu, di edisi pamungkas majalah Edukasi Keuangan tahun 2018 ini, kami memilih untuk “berhenti” sejenak dan melihat kembali apa yang terjadi sepanjang tahun 2018, khususnya dalam hal kegiatan pembelajaran di BPPK dan Kementerian Keuangan.

Bagi tim redaksi Edukasi Keuangan, tahun 2018 merupakan tahun yang penuh dengan perubahan. Mulai dari perubahan major disain dan *layout* majalah ini, hingga munculnya berbagai program dan inovasi baru BPPK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Kementerian Keuangan.

Di Liputan Utama, kami mencuplik beberapa *highlight* kegiatan pembelajaran mulai dari penyelenggaraan Pelatihan Dana Desa hingga Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS Kemenkeu, serta kegiatan GDLN Asia Pacific Regional Meeting dan program Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu (SBKK). Fakta-fakta seputar capaian BPPK di tahun 2018 juga kami sisipkan di Liputan Utama.

Selanjutnya di Liputan Khusus, Pusdiklat Keuangan Umum akan berbagi ceritanya menyelenggarakan 200 kelas pelatihan, di tambah berbagai workshop dan program *e-learning* pengenalan Kemenkeu Corpu.

Bagi anda yang ingin membaca tulisan seputar ilmu keuangan negara, di Serambi Ilmu kami menyajikan tiga artikel terkait *Green Sukuk*, Program Padat Karya Tunai serta tentang *Customer Satisfaction Index* (CSI).

Dan sebelum anda membuat resolusi untuk tahun 2019, simak beberapa fakta dibalik ungkapan Resolusi di rubrik Tahukah Kamu. Sedangkan di Kolom Softskill anda dapat membaca jurus untuk mengoptimalkan suara anda saat melakukan *public speaking*. Baca juga rubrik-rubrik khas Edukasi Keuangan lainnya.

Akhir kata, semoga segala pencapaian di tahun 2018 sesuai dengan harapan kita semua, dan selamat menyongsong tahun baru 2019!

November - Desember

FOTO : SENO ADI NUGROHO
ABDUL 'AZIZ MAGHFUR
DOK. PUSDIKLAT PAJAK

MUKERNAS WIDYAIKWARA 2018

Widyaiswara BPPK sukses menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Widyaiswara pada tanggal 12 dan 13 November 2018 di Pusdiklat Pajak yang juga dihadiri oleh Wakil Menkeu RI, Bapak Mardiasmo.



PERESMIAN ASRAMA PUSDIKLAT PAJAK

Gedung asrama baru Pusdiklat Pajak diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Acara peresmian tersebut berlangsung meriah dengan sambutan tarian adat palang pintu Betawi. Setelah tarian tersebut usai, Ibu Menteri langsung melakukan pemotongan pita, tanda tangan prasasti, dan berkeliling melihat beberapa fasilitas yang disediakan oleh asrama baru Pusdiklat Pajak.



SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA 2018

Diselenggarakan di Pusdiklat Pajak BPPK tanggal 14 November 2018, kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati yang sekaligus memberikan *keynote speech*.



PELANTIKAN ESELON II KEMENKEU

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melantik 33 pejabat eselon II dan seorang Staf Ahli Menteri Keuangan. Di antara yang dilantik, terdapat nama Heni Kartikawati yang dipromosikan sebagai Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, BPPK).



SEMINAR ON CUSTOMS HRD

Pusdiklat Bea Cukai menyelenggarakan *Seminar on Customs Human Resource Development* pada tanggal 29 – 30 November 2018 di Jakarta. Seminar ini dimaksudkan sebagai sarana bertukar pengalaman dan membangun kerja sama antar institusi pelatihan pabean negara anggota ASEAN dan Australia.



RAPAT KOORDINASI BPPK 2018

Guna mengevaluasi pencapaian tahun 2018 dan mengonsolidasikan target kinerja tahun 2019, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menggelar rapat koordinasi di Bandung, 12-14 Desember 2018, dengan tema “Menguatkan Sinergi dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembelajaran.”



ORASI ILMIAH & PENGUKUHAN WI UTAMA

Dalam acara Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Utama pada tanggal 18 Desember 2018 lalu, dua orang widyaiswara BPPK, Lalu Hendri Yujana dan Heru Supriyanto, menyampaikan orasi ilmiah sekaligus dikukuhkan sebagai WI Utama.

ARIMBI PUTRI

SEMANGAT BPPK MEMBANGUN INOVASI PELATIHAN DAN JARINGAN

Pepatah mengatakan kesuksesan adalah sebuah tangga, bukan eskalator. Sejak transformasi organisasi dilakukan pada 2015, BPPK terus menapaki anak demi anak tangga menuju lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang mencetak pengelola keuangan negara berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, sepanjang 2018 BPPK giat mengupayakan inovasi pelatihan untuk memberikan #lebihdaridiklat, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak.

Pendidikan dan pelatihan dalam suatu instansi mutlak diperlukan untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagai penggerak roda organisasi tersebut. Dalam risetnya berjudul “Role of Training & Development in an Organizational Development”, Vinesh (2014) menyebutkan pendidikan dan pelatihan merupakan tugas dan tanggung jawab besar yang tidak mudah dilakukan karena memerlukan analisis pertambahan nilai (*value adding*) yang memastikan

bahwa pengembangan kompetensi pegawai tersebut secara efektif mampu meningkatkan performa organisasi.

Instansi pengelola pendidikan dan pelatihan ini harus mampu melihat kebutuhan individu yang sekaligus sejalan dengan kebutuhan organisasi di mana dia bekerja. Pengembangan kompetensi dilihat berdasarkan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan performa, kualitas, kepuasan konsumen, manajemen dan kontrol organisasi yang efektif, atau bahkan meningkatkan keuntungan – yang dalam hal ini adalah penerimaan negara, baik melalui penerimaan pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pelatihan, menurut Vinesh, akan fokus pada aktivitas dan pekerjaan yang sedang dilakukan, sementara pengembangan sumber daya manusia merupakan persiapan pegawai lebih jauh untuk peranan dan tanggung jawab organisasi ke depannya. Pendidikan dan pelatihan ini juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan sistem yang berlaku di tempat para pegawai bekerja, yang menjadi salah satu kunci dalam pengembangan SDM (ibid.213).

Salah satu bentuk konkret yang paling fundamental dari pemaparan tersebut yakni pelatihan dasar (latsar) bagi para calon aparatur sipil negara (CASN) yang wajib dilaksanakan bagi calon punggawa negara. Pelaksanaan latsar ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Kepala LAN Nomor 24 dan 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Peraturan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 63 ayat (3) dan (4) yang menyatakan CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan

melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Latsar dapat dikatakan pintu gerbang bagi instansi pendidikan dan pelatihan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Sebelum melangkah menjadi pegawai, instansi harus memastikan individu tersebut memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Untuk membentuk hal tersebut, instansi pemerintahan melaksanakan pembinaan melalui jalur latsar, yang di Kementerian Keuangan pengelolaannya dilakukan oleh BPPK.

Salah satu wujud pencapaian BPPK pada tahun 2018 terkait latsar yaitu perolehan akreditasi A bagi penyelenggara latsar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dalam pelaksanaannya, BPPK terus mencari, mengembangkan, dan mengevaluasi metode pembelajaran dalam latsar untuk mendapatkan sistem yang paling tepat, efektif, dan efisien untuk menghasilkan para pengelola keuangan negara yang berintegritas dan berkepribadian cakap. Pencapaian dalam pelaksanaan latsar tersebut semakin menambah laju BPPK untuk mencapai visi yang telah dicita-citakan.

Tak hanya internal pegawai Kemenkeu, BPPK juga melayani pelatihan eksternal terhadap 2.047 pengelola keuangan desa selama 2018. Pelatihan yang melibatkan aparatur desa ini merupakan bentuk perwujudan Nawacita pemerintah butir ketiga, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Pelatihan ini juga didasari pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Bab VIII tentang Keuangan Desa dan Aset Desa.

Sejak dicanangkan pada 2015, dana desa telah dikucurkan setidaknya Rp187,74 triliun untuk membangun infrastruktur desa. Dana yang tidak sedikit tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik dari para aparatur desa agar tepat sasaran, efisien, dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Masih minimnya pengetahuan terkait pengelolaan keuangan dan aset desa membuat pelatihan keuangan terhadap aparatur desa menjadi sebuah keharusan. Melalui Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK), BPPK memberikan pelatihan di 671 desa wilayah Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.

Pelatihan di sejumlah desa pada wilayah tersebut menjadi prioritas dari jumlah total 74 ribu desa di seluruh Indonesia, dilihat berdasarkan tingkat urgensi, keterjangkauan, dan kesiapan sarana prasarannya. Dengan demikian, komitmen BPPK tak hanya memajukan instansi melalui SDM yang berkualitas, namun juga turut memberikan sumbangsih membangun negeri melalui SDM pengelola keuangan desa yang terampil dan akuntabel. Hal tersebut diharapkan mampu meminimalisasi kesenjangan dan ketertinggalan desa-desa yang berada di pelosok negeri.

JALIN KERJA SAMA TINGKATKAN JARINGAN

Membangun jaringan ibarat menanam benih, batangnya akan tumbuh semakin tinggi, cabangnya semakin banyak, dan buahnya dipetik di kemudian hari. Bagi instansi yang berfungsi mengembangkan SDM, menjalin kerja sama dan memperluas jaringan sosial menjadi salah satu kebutuhan guna meningkatkan informasi, pengetahuan, peluang, membuka wawasan baru dan kesempatan belajar, serta memperoleh koneksi yang bisa memberikan banyak kemudahan. Menurut Samad (2003), jalinan kerja sama antarinstansi harus didasarkan pada kebutuhan dan keinginan untuk menghadapi perubahan era yang sangat dinamis. Selain itu, dengan adanya kerja sama, mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan instansi dalam bernegosiasi.

Hal ini tentunya sejalan dengan misi BPPK butir kelima, yakni meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik. Tak tanggung, BPPK menjajaki kerja sama melalui forum internasional yang menaungi 120 institusi global di 80 negara, yakni Global Development Learning Network (GDLN). GDLN merupakan jaringan kerja sama pembelajaran jarak jauh yang diinisiasi Bank Dunia. Tercatat sudah sembilan tahun BPPK berafiliasi dengan GDLN, dan mulai aktif mengikuti serangkaian kegiatan di dalamnya sejak 2016.

Tahun ini, BPPK berkesempatan menjadi tuan rumah dalam *regional meeting* GDLN Asia Pacific dan penyelenggara program pembelajaran ke dalam *marketplace* GDLN Asia Pacific. *Marketplace* GDLN tersebut memungkinkan para anggota yang memiliki suatu program untuk memasarkan kegiatannya kepada anggota lain atau merekomendasikan suatu isu untuk dibahas dalam program atau kegiatan selanjutnya. Hal ini juga dapat meningkatkan eksistensi dan citra para anggota GDLN dalam forum internasional.

BPPK melalui Pusdiklat Keuangan Umum mengutarakan manfaat yang didapat melalui forum internasional ini. Kerja sama dengan GDLN mampu meningkatkan informasi terkini terkait tema yang dibahas karena afiliasi GDLN rata-rata sudah mapan dari segi riset, yang juga tengah dikembangkan BPPK. Selain itu, forum internasional ini juga mampu memperkaya metode pembelajaran di BPPK, dan sederet manfaat lain yang bersifat immaterial. Pun sebaliknya, dari sisi anggota GDLN yang lain juga memiliki ketertarikan tersendiri terhadap pemerintahan Indonesia, salah satunya dalam menangani krisis global pada 2008 silam. Melalui forum ini, setiap anggota dapat saling bertukar pengetahuan dan informasi yang tentunya akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Bentuk kerja sama lain yang bersifat unik dan berbeda adalah Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu (SBKK). Tidak seperti program-program Kemenkeu atau BPPK pada umumnya, program pilot Kemenkeu di 2018 ini tidak secara langsung berkaitan dengan keuangan negara. Bekerja sama dengan Yayasan SabangMerauke, SBKK mengajarkan toleransi antarbudaya yang melibatkan pejabat Kemenkeu, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, dan beberapa siswa SMP yang telah melalui proses seleksi.

SBKK dilaksanakan melalui pertukaran pelajar SMP di sejumlah daerah di Indonesia, yang tinggal selama sepekan di kediaman pejabat Kemenkeu yang berbeda latar belakang budaya, etnis, hingga keyakinan. Program ini diselenggarakan untuk meningkatkan rasa toleransi antarbudaya di Indonesia, yang semakin pudar di era pascareformasi dan pertempuran politik. Masing-masing peserta SBKK diharapkan mampu menjadi agen perubahan dengan menularkan cerita dan semangat toleransinya kepada lingkungan di tempat mereka berada.

Kesuksesan SBKK menjadi pijakan kontinuitas program ini di tahun-tahun mendatang. Tujuan positif dan mulia dari SBKK bekerja sama dengan SabangMerauke tersebut mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari sejumlah pihak, termasuk peserta SBKK itu sendiri. Dengan demikian, bentuk kerja sama ini secara tidak langsung membantu membangun Indonesia yang toleran dan penuh kedamaian. Semangat BPPK tetap memajukan Indonesia melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi, dengan menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan yang terkemuka.

YOHANA TOLLA

MENCETAK PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN NEGARA BERKELAS DUNIA

Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa keberhasilan organisasi perlu bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Setiap organisasi berlomba-lomba untuk selalu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Proses pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan.

Coquitt, LePine, dan Wesson (2013:264) menyebutkan bahwa pelatihan adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi secara sistematis untuk memfasilitasi pembelajaran tentang *job-related knowledge* dan perilaku. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab pada keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sudah menyiapkan cara dan strategi untuk membekali para pengelola keuangan negara, baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi perilaku. Sasaran dari pelatihan tidak hanya terbatas pada pegawai di lingkungan Kemenkeu saja, melainkan semua pegawai yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan keuangan negara di instansinya masing-masing.

PELATIHAN DASAR, LANGKAH AWAL PEGAWAI KEMENKEU

Setelah dinyatakan lulus seleksi calon pegawai, CPNS Kemenkeu diwajibkan untuk mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar). Pelatihan ini diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter, dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Kompetensi yang ingin dibangun adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, dan menunjukkan penguasaan kompetensi

teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Latsar diselenggarakan oleh lembaga diklat ASN yang telah diakreditasi oleh LAN. Akreditasi ini dimaksudkan untuk menjamin mutu penyelenggaraan diklat, dimana komponen penilaiannya meliputi Dasar Hukum, Tenaga Kediklatan, Perencanaan Strategis, Fasilitas Diklat, Komite Penjamin Mutu, dan Manajemen Diklat. Di tahun 2018, BPPK melalui Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia berhasil mendapatkan akreditasi A untuk penyelenggaraan Latsar.

Salah satu syarat pengangkatan PNS adalah lulus Pelatihan Dasar, dapat dikatakan bahwa Latsar merupakan langkah awal pengabdian pegawai di organisasi. Latsar merupakan pelatihan pembentukan karakter sehingga output yang diharapkan adalah pegawai yang berperilaku baik, berkepribadian baik, serta mampu memahami dan mengimplementasikan semua budaya organisasi. Mengingat sifatnya sebagai pelatihan pembentukan karakter, maka selama mengikuti Latsar para peserta dituntut untuk meningkatkan derajat kedisiplinannya. Pusdiklat PSDM, selaku penyelenggara Latsar juga telah menyiapkan situasi pembelajaran yang mendukung dengan melibatkan tidak pengajar, penyelenggara, cleaning service, petugas *laundry*, serta pihak lain yang terlibat langsung dengan peserta selama mengikuti Latsar. Pihak-pihak tersebut telah dijelaskan dari awal tentang peran mereka dalam pembelajaran, bagaimana pola hubungan mereka dengan peserta, sehingga diharapkan dapat membantu membangun suasana pembelajaran yang kondusif bagi peserta.

Sepanjang penyelenggaraan Latsar tahun 2018, panitia penyelenggara tidak segan-segan melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta. Sanksi yang dijatuhkan berupa Surat Peringatan (SP) Sedang dan

SP Berat dan dinyatakan tidak lulus Latsar. Ironisnya, ketidaklulusan Latsar di Kemenkeu lebih karena pelanggaran disiplin, bukan dari segi akademik. Panitia penyelenggara juga rutin melakukan sidak untuk melakukan pengecekan terhadap kedisiplinan peserta. Sikap tegas panitia penyelenggara dalam menegakkan kedisiplinan mendapatkan apresiasi dan respon positif dari jajaran pimpinan unit asal peserta. Setiap penjatuhan sanksi ditembuskan ke unit asal, bahkan di beberapa unit ada yang melakukan penyidikan kedisiplinan kembali ketika peserta tersebut pulang ke unit asalnya.

Jadwal pembelajaran yang cukup padat yang diimbangi dengan tingginya standar yang harus dipenuhi oleh peserta membuat panitia penyelenggara berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan peserta dapat dipenuhi. Selain kebutuhan dasar, dalam rangka menerapkan prinsip Pengarusutamaan Gender, panitia penyelenggara juga menyediakan fasilitas khusus bagi peserta yang memiliki kebutuhan khusus. Beberapa fasilitas yang disediakan seperti kamar-kamar untuk peserta yang membawa bayi dan disertai dengan jadwal pumping, sampai pada penyediaan kursi di tempat ibadah bagi peserta difabel kaki. Selain itu, panitia juga memberikan kesempatan pada peserta yang melahirkan untuk melaksanakan ujian di rumah sakit serta menyiapkan petugas untuk membacakan soal ujian dan melingkari jawaban bagi peserta difabel mata.

Melayani 6.678 peserta Latsar di 14 lokasi tentu saja memerlukan strategi tersendiri. Di tahun 2018 ini, Pusdiklat PSDM telah menyiapkan beberapa inisiatif strategis, yaitu penggunaan e-learning untuk agenda Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT), pelaksanaan ujian pelatihan dengan computer assisted test (CAT), absensi fingerprint, dan tidak mempergunakan hardcopy untuk modul pelatihan. Untuk menjawab tantangan penyelenggaraan ke depannya tentu masih ada tantangan yang perlu disikapi bersama. Yang pertama adalah belum tersedianya akomodasi untuk pelatihan

skala besar. Selain itu ketersediaan video pembelajaran yang sesuai dengan tema-tema dalam pelatihan Latsar masih terbatas. Penyelenggaraan pelatihan di lokasi berbeda juga perlu disikapi dengan cermat mengingat tantangan terbesarnya adalah standarisasi penyelenggaraan di semua lokasi. Untuk itu, koordinasi dan dukungan dari semua pihak mutlak dibutuhkan untuk membantu melancarkan penyelenggaraan Latsar.

DIKLAT DANA DESA, DUKUNGAN BPPK UNTUK LANCARNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

Dukungan BPPK terhadap aparatur pengelola keuangan negara tidak hanya khusus bagi pegawai Kemenkeu saja. Berbagai pelatihan telah dikembangkan untuk membantu pengelola keuangan negara non-Kemenkeu, salah satunya adalah Diklat Dana Desa. Diklat ini dikembangkan dalam rangka membantu pemerintah untuk mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini mengamanatkan program Dana Desa, dimana melalui program ini, desa diberi kesempatan untuk melaksanakan kewenangannya dalam mengurus dan mengelola tata pemerintahannya sendiri. Agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik dan akuntabel, maka BPPK melalui Pusdiklat KNPK menginisiasi Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Ada empat program pelatihan, Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa, Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Aset Desa, dan yang terakhir adalah Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUM Desa. Keempat pelatihan tersebut memiliki sasaran yang berbeda-beda, dimana masing-masing desa diharapkan dapat mengikuti keempat program tersebut sehingga perangkat desa dapat memahami secara menyeluruh.

Untuk tahun 2018 pelatihan dana desa ini melayani 2.047 peserta yang berasal

dari 671 desa di provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Setiap peserta yang mengikuti pelatihan wajib mengikuti pretest yang dilaksanakan sebelum materi pelatihan diberikan dan posttest pada akhir pelatihan. Hasilnya, 69,74% peserta mendapatkan nilai posttest yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik setelah diberikan pelatihan.

Di samping melaksanakan pelatihan, Pusdiklat KNPK juga melaksanakan kegiatan asistensi untuk membantu daerah dalam menerapkan pengelolaan dana desa. Ada tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selain itu, Pusdiklat KNPK juga akan mengadakan kegiatan evaluasi pasca pelatihan untuk mengetahui outcome dari pelatihan terhadap desa-desa yang mengikuti pelatihan, juga diharapkan dapat menghasilkan perbaikan untuk pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Keberhasilan program pelatihan dana desa ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Di tingkat daerah, BPPK bekerja sama dengan Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD/DPMD) Provinsi yang bertindak sebagai penghubung antara penyelenggara diklat dengan pemerintah desa. BPMD/DPMD juga memberikan rekomendasi lokasi penyelenggaraan dan nama-nama desa calon peserta pelatihan dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan kesiapan sarana prasarana di lokasi pelatihan, serta

rekomendasi pengajar lokal yang turut mengisi materi di dalam pelatihan. Di tingkat pusat, BPPK bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Pemerintah Daerah untuk merumuskan formula yang diperlukan dalam rangka penguatan aparat desa terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui program pelatihan.

Ke depannya, Pusdiklat KNPK akan kembali menyelenggarakan pelatihan serupa dengan menambah jumlah provinsi, dari semula tiga provinsi menjadi empat provinsi. Dengan semakin bertambahnya jumlah lokasi pelatihan diharapkan dampak yang ditimbulkan oleh pelatihan ini dapat lebih tersebar, sehingga amanah Nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran, dapat terwujud.

YOHANA TOLLA

KEMBANGKAN JARINGAN, TAK SEKADAR PELATIHAN

Banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk mencapai tujuan. Sebagai lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang pengembangan pegawai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terus berinovasi dan berkembang. Selain melakukan evaluasi yang berkelanjutan, BPPK juga menjalin kerja sama dengan organisasi lain untuk menambah wawasan serta meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Peningkatan pengetahuan tidak hanya berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenkeu saja, tetapi juga menyentuh ranah perilaku.

JEJAK LANGKAH BPPK DI FORUM INTERNASIONAL

Dalam rangka meningkatkan konten pembelajaran, *networking*, dan pengalaman, BPPK menjajaki kerja

sama dengan mengikuti berbagai forum internasional. Salah satu forum yang diikuti oleh BPPK adalah Global Development Learning Network (GDLN). GDLN adalah jaringan kerja sama pembelajaran jarak jauh yang diinisiasi dan dibina oleh Bank Dunia. Lembaga ini berafiliasi dengan 120 institusi global (afiliasi) di 80 negara. Secara kolektif, afiliasi-afiliasi ini menyelenggarakan lebih dari 1000 sesi pembelajaran, bentuknya bisa berupa program pelatihan, sesi *brainstorming* informal, dialog multilateral, atau konferensi virtual. Ahli-ahli pembelajaran di GDLN berkolaborasi untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari sasaran program. Setiap sesi didesain secara spesifik untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang sesuai dengan peserta program, dan juga melibatkan para pakar.

Semenjak tahun 2012, BPPK mulai mengikuti program seminar dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh GDLN. Pemilihan program seminar dan pembelajaran yang diikuti berdasarkan pada kebutuhan organisasi. Program pertama yang diikuti BPPK adalah *Blended Learning on Science and Policy of Climate Change* yang diselenggarakan oleh *The Energy Resource Institute*, India. Dengan difasilitasi oleh Pusdiklat Keuangan Umum sebagai *local host*, kegiatan *blended learning* ini berlangsung dari 11 April – 11 Juli 2012 dan diikuti oleh 17 peserta. Aktivitas pembelajaran yang berlangsung meliputi kegiatan tatap muka melalui fasilitas video conference dan juga penugasan individu. Setelah itu, BPPK selalu hadir dan secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh afiliasi GDLN.

Menginjak tahun kesembilan keikutsertaan di forum GDLN, BPPK didaulat menjadi tuan rumah Regional Meeting GDLN AP. Dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 25 - 27 April 2018, kegiatan ini mengambil tema “*Enhancing Policy Making Through Innovative Learning in Digital Economy Era*”. Pada kesempatan ini, para peserta tidak hanya melakukan evaluasi dan membahas rencana kegiatan organisasi ke depan, tetapi juga diisi dengan pemaparan terkait pembelajaran di era ekonomi digital oleh beberapa narasumber yang kompeten. Selain menjadi tuan rumah *regional meeting*, di tahun 2018 ini BPPK menawarkan diri untuk berperan sebagai penyelenggara program pembelajaran. Ada dua program pembelajaran yang ditawarkan ke *marketplace*, yaitu program dengan tema *Fiscal Risk Statement* dan tema *Public Policy Reform: Crisis Anticipation and Management*.

Menjadi bagian dari forum GDLN serta berkesempatan menjadi tuan rumah *regional meeting* tentu saja memberikan banyak manfaat. Dengan menjadi

anggota forum memungkinkan BPPK untuk mendapatkan program *capacity building* yang bervariasi. Selain itu, mengingat program pelatihan diinisiasi oleh afiliasi GDLN yang berasal dari negara-negara yang berbeda, maka BPPK dimungkinkan untuk menghadirkan narasumber yang berkualitas internasional dengan biaya minimal. Jejaring ini juga dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerja sama dengan kampus-kampus yang berafiliasi dengan GDLN, seperti KDI (Korea Selatan), ANU (Australia), AFDI (Tiongkok). Kerja sama tersebut dapat dalam bentuk tenaga pengajar, pertukaran pelajar, maupun kerja sama riset.

Dari sisi penyelenggaraan Regional Meeting GDLN AP, ada beberapa manfaat yang dapat dipetik. Misal, dari segi keilmuan, Indonesia bisa mendapatkan *sharing* dan pengalaman berharga dari para anggota, khususnya yang berasal dari negara lain. Indonesia juga berkesempatan untuk memberikan materi dan mendapatkan *feedback* dari peserta yang hadir. Manfaat lain yang dapat diambil adalah kesempatan untuk memematangkan strategi Kementerian

Keuangan Corporate University (Kemenkeu Corpu) yang saat ini sedang diterapkan oleh BPPK. Penggunaan *video conference* sebagai metode pembelajaran jarak jauh yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan GDLN sangat sesuai dengan strategi Kemenkeu Corpu yang tidak hanya mengandalkan kegiatan tatap muka saja. Metode tersebut nantinya juga dapat diadopsi dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK sehingga dapat memperkaya variasi dari *blended learning* di BPPK.

MARI BELAJAR TOLERANSI

Tahun 2018 ini BPPK menggandeng Relawan SabangMerauke untuk menyelenggarakan kegiatan Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu (SBKK), tepatnya pada tanggal 8-15 Juli 2018. Secara umum, SBKK adalah program pertukaran pelajar antardaerah di Indonesia, di mana pelajar SMP tersebut ditempatkan di keluarga yang berbeda agama dan/atau etnis. Sejalan dengan kegiatan serupa yang diselenggarakan Yayasan SabangMerauke, kegiatan ini



FOTO : SENO ADI NUGROHO

FOTO : M. FATH



bertujuan untuk mengajarkan toleransi. Ada tiga pihak yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini, yaitu Family, Adik, dan Kakak. Family merupakan pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan. Adik adalah pelajar SMP yang telah diseleksi, dan Kakak adalah mahasiswa PKN STAN. Selama seminggu, Adik dan Kakak akan tinggal bersama dengan Family yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda untuk belajar tentang toleransi.

Selama satu minggu, dari tanggal 8-15 Juli 2018 adik dan kakak SBKK mengikuti kegiatan sesuai dengan agenda yang telah disusun. Pada hari pertama, mereka diajak ke Taman Mini Indonesia Indah untuk mengikuti berbagai macam aktivitas. Hari kedua, kegiatan dilaksanakan di Cilincing, Jakarta Utara dengan mendatangi berbagai tempat ibadah. Hari ketiga, kegiatan dilaksanakan di Sekretariat

BPPK Purnawarman. Hari keempat, lokasi kegiatan berpindah ke PKN STAN. Dan di hari kelima, mereka diajak untuk ikut ke kantor familinya masing-masing. Mayoritas kegiatan tersebut dilaksanakan dari pagi sampai sore hari. Setelah kegiatan selesai, mereka kembali ke tempat familinya masing-masing.

Setiap kegiatan yang dilakukan sepanjang program diharapkan dapat menanamkan kembali nilai toleransi diantara para peserta. Misal, pada agenda hari kedua peserta diajak untuk mengunjungi rumah ibadah di Cilincing. Pada hari itu, secara bergantian para peserta diajak mengunjungi lima rumah ibadah serta melakukan dialog dengan perwakilan di sana. Melalui agenda ini diharapkan para peserta dapat lebih mengenal agama-agama lain di luar agama mereka sendiri sehingga pada akhirnya dapat menangkai berbagai prasangka negatif karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman.

Ada yang spesial pada penyelenggaraan program SBKK hari kelima, semua peserta berkesempatan untuk menghadiri acara “Main Ke RumahKeu” yang dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran pimpinan di lingkungan Kemenkeu. Tidak hanya peserta SBKK, acara tersebut juga dihadiri oleh peserta kegiatan serupa yang digelar secara paralel oleh Relawan SabangMerauke. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menceritakan pengalaman belajar toleransinya selama mengikuti program. Hal ini disambut baik oleh para peserta, mereka dengan sangat antusias secara bergiliran menceritakan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut. Menanggapi cerita dari anak-anak SBKK dan SabangMerauke, Sri Mulyani berpesan bahwa Manusia itu pada dasarnya memiliki hati dan pikiran yang baik. Namun seringkali karena ketidaktahuan terhadap sesuatu, yang kemudian muncul kemudian adalah prasangka, yang mayoritas adalah prasangka negatif. Untuk itu, Ia mengajak anak-anak tersebut untuk lebih mengenal dan memahami perbedaan yang ada. Menteri Keuangan juga berharap agar kedepannya kegiatan serupa dapat kembali diselenggarakan dengan peserta yang lebih banyak lagi.

Selain mengajarkan toleransi, program SBKK ini juga memberikan nilai tambah bagi mahasiswa PKN STAN, terutama bagi mereka yang mengambil bagian sebagai “Kakak”. Para mahasiswa ini kedepannya akan menjadi pegawai, baik di Kemenkeu ataupun di instansi lain. Dengan mengikuti program ini diharapkan para “Kakak” dapat menjadi agen perubahan di lingkungan kerjanya kelak, terutama dalam menularkan nilai-nilai toleransi. Terlebih lagi dengan adanya kemungkinan untuk bertugas di tempat yang berbeda latar belakang budaya dengan mereka. Semakin tinggi nilai toleransinya maka tingkat resistensi pegawai untuk ditugaskan di wilayah yang berbeda latar belakang budayanya akan menurun.

SHERA BETANIA
PELAKSANA PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM

Yang Baru dari Pusdiklat KU

FOTO : DOK. PUSDIKLAT KU



2018 bisa jadi merupakan tahun yang cukup sibuk bagi Pusdiklat Keuangan Umum. Sebagai informasi, dari awal tahun yang direncanakan akan menyelenggarakan lebih dari 100 kelas pelatihan, hingga akhir tahun 2018 ini Pusdiklat Keuangan Umum telah menyelenggarakan lebih dari 200 kelas pelatihan. Banyaknya program pelatihan baru menjadi satu tantangan tersendiri bagi Pusdiklat Keuangan Umum untuk mampu memberikan pelatihan yang selaras dengan semangat Kementerian Keuangan *Corporate University*.

Berbeda dengan Pusdiklat lain yang memiliki satu atau dua *user* utama, atau Pusdiklat yang berorientasi pada pengembangan *softskill*, Pusdiklat Keuangan Umum memiliki 5 *user* utama, yaitu 5 unit Eselon I Kementerian Keuangan: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dengan banyak dan beragamnya kebutuhan masing-masing unit Eselon I, Pusdiklat Keuangan Umum harus mampu meramu jenis program pelatihan dengan memanfaatkan berbagai media.

Media pembelajaran menjadi salah satu kunci dalam suksesnya dan tercapainya Kementerian Keuangan *Corporate University*. Pada tahun ini, Pusdiklat Keuangan Umum sukses menjalankan beberapa program pelatihan menggunakan media teknologi informasi, yaitu melalui *e-learning* dan *video conference*.

E-LEARNING PENGENALAN KEMENKEU CORPU

Tidak hanya pelatihan klasikal, namun juga pelatihan nonklasikal. Melalui *E-Learning* Pengenalan Kementerian Keuangan *Corporate University*, peserta diajak untuk makin memahami Kementerian Keuangan *Corporate University*, yang seluruhnya dilakukan secara *online*. Pembelajaran melalui *e-learning* ini bukan yang pertama bagi BPPK, khususnya Pusdiklat Keuangan Umum. Yang membuat berbeda adalah jumlah peserta yaitu sebanyak 1.200 peserta dan keseluruhan kegiatan pembelajaran dilakukan nonklasikal atau dalam kata lain, tanpa adanya pertemuan tatap muka. *E-Learning* ini terdiri dari 6 serial *microlearning*, yaitu:

- 1. Overview Kementerian Keuangan Corporate University
- 2. Tugas Kementerian Keuangan dan urgensi Kementerian Keuangan Corporate University
- 3. Corporate University Assessment

- 4. Proses dan karakteristik pembelajaran dalam Kemenkeu Corpu serta House of Kemenkeu Corpu
- 5. Staffing, strategi pembelajaran, serta faktor pendukung dan risiko implementasi Kemenkeu Corpu
- 6. Langkah-langkah menuju Kementerian Keuangan Corporate University

Keenam serial *microlearning* tersbut harus dipelajari seluruhnya untuk dapat menyelesaikan rangkaian pembelajaran Pengenalan Kementerian Keuangan *Corporate University*. Peserta yang lulus dari setiap serial akan mendapatkan *badge*. Sertifikat diberikan jika peserta telah menyelesaikan seluruh rangkaian *microlearning*. Dalam pelaksanaannya, *e-learning* ini dibagi menjadi 4 angkatan, masing-masing angkatan diikuti oleh 300 peserta. Selama 10 hari, peserta diwajibkan untuk mengikuti pelatihan *online* ini (dan mendapatkan 6 *badges*) agar lulus dan mendapatkan sertifikat.

GDLN WORKSHOP SERIES

GDLN atau *Global Distance Learning Network* adalah jaringan kerja sama pembelajaran jarak jauh yang diinisiasi dan dibina oleh Bank Dunia, yang menghubungkan banyak institusi global dari berbagai negara secara *online* melalui jaringan *video conference*. Kementerian Keuangan sebagai bagian dari GDLN, telah mengikuti banyak seminar atau *workshop series* yang diselenggarakan oleh peserta GDLN lainnya. Program seminar atau *workshop* GDLN ditawarkan melalui *marketplace*, yang bisa diikuti oleh seluruh peserta GDLN. Menjadi *host* atau penyelenggara *workshop* GDLN merupakan hal baru bagi Kementerian Keuangan, terutama BPPK c.q. Pusdiklat Keuangan Umum. Kegiatan GDLN yang dilakukan melalui *video conference*, menjadi tantangan baru bagi Pusdiklat Keuangan Umum untuk menyajikan program pembelajaran dengan tema yang menarik bagi peserta GDLN. Dua program yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan (c.q. BPPK) dalam *marketplace* ada dua

program, yaitu *Workshop Policy Reform: Crisis Anticipation and Management (Law No. 9 of 2016)* dan *Workshop Risk Statement; an Effort of Indonesia to Improve Stakeholders Awareness Fiscal Transparency, Fiscal Accountability and Fiscal Sustainability*.

Sebagai informasi, beberapa anggota GDLN yang turut serta dalam dua *workshop series* yang Pusdiklat Keuangan Umum selenggarakan antara lain berasal dari Korea Development Institute Korea Selatan, Distance Learning Center Sri Lanka dan Universitas Indonesia.

- 1. *Workshop Policy Reform: Crisis Anticipation and Management (Law No.9 of 2016)*

Tema *workshop* ini diangkat karena pengalaman Indonesia yang mampu bangkit dan makin maju setelah melalui dua kali krisis hebat, krisis Asia di tahun 1997, dan krisis global di tahun 2008-2009. Setiap negara memiliki cara tersendiri dalam merespons krisis yang terjadi, begitu juga dengan Indonesia. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis diharapkan mampu menjadi pelajaran tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi negara lain. Program ini memberikan gambaran dan pemahaman bagi para peserta mengenai mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin pening setelah munculnya krisis keuangan global pada awal tahun 2008. Maka dari itu, pemerintah saat itu menerbitkan dan mengesahkan Undang Undang No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai landasan bagi lembaga untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan. Program ini merupakan sarana diseminasi pengalaman yang telah Indonesia lakukan dalam reformasi kebijakan publik, untuk mengantisipasi dan menangani ancaman krisis.

Kegiatan ini diselenggarakan pada 14 dan 21 September 2018 di *Smart Classroom* BPPK. Narasumber yang dihadirkan pada *workshop series* pertama ini adalah

FOTO : DOK. PUSDIKLAT KU

Deni Ridwan yang merupakan Direktur Manajemen Risiko dan Hukum Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Mr. Kang Dongsoo yaitu Executive Director of Research Planning and Coordination Bureau dari Korea Development Institute yang juga membagikan pengalaman Korea Selatan dalam menghadapi krisis di negaranya.

- 2. *Workshop Risk Statement; an Effort of Indonesia to Improve Stakeholders Awareness Fiscal Transparency, Fiscal Accountability and Fiscal Sustainability*

Kebutuhan akan pengelolaan Risiko Keuangan Negara muncul setelah terjadinya beberapa peristiwa yang berdampak kepada kerugian negara secara signifikan, seperti pada krisis ekonomi tahun 1997. Peristiwa seperti itu mampu menjadi pelajaran yang baik untuk menunjukkan bahwa terjadinya risiko keuangan negara berpeluang mengganggu kesinambungan anggaran. Dengan pengelolaan risiko keuangan negara yang baik dan secara menyeluruh, akan berdampak terhadap penurunan

persepsi risiko negara dan memperbaiki *sovereign rating* yang pada akhirnya akan menurunkan imbal hasil surat utang yang akan dikeluarkan pemerintah.

Secara umum, *workshop* ini didesain untuk mendiseminasikan reformasi kebijakan publik yang dilakukan Indonesia melalui pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan dan APBN, serta mampu memberikan masukan kepada unit pengelola risiko Kementerian Keuangan dalam melakukan pengelolaan risiko menjadi lebih *prudent*. Kegiatan ini diselenggarakan pada 1 dan 8 November 2018 di *Smart Classroom* BPPK, menghadirkan Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko APBN Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Riko Amir.

Serambi Ilmu

GREEN SUKUK DAN KOMITMEN INDONESIA TERHADAP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Eri Hariyanto	GREEN SUKUK DAN KOMITMEN INDONESIA TERHADAP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Koko Inarto	MEMBEDAH PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DI DESA TAHUN 2018
Riyanto	MENGUKUR KEPUASAN PESERTA PELATIHAN ATAS KINERJA PENGAJAR DENGAN MENGGUNAKAN CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI)

ABSTRAK

Isu-isu terkait mitigasi perubahan iklim dan penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan terus menjadi topik yang menarik dalam berbagai pertemuan tingkat internasional. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk turut andil dalam isu-isu tersebut. Pemerintah telah menyepakati berbagai komitmen dan berupaya mengimplementasikannya dalam berbagai kebijakan pembangunan. Dengan keterbatasan sumber dana yang ada, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi sumber pembiayaan agar komitmen terhadap pengurangan dampak perubahan iklim dapat dilaksanakan. Salah satu bentuk diversifikasi pembiayaan tersebut adalah dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara yang khusus didedikasikan untuk pembiayaan infrastruktur yang berstatus ramah lingkungan. Instrumen pembiayaan tersebut dikenal dengan *green sukuk* yang pertama kali diterbitkan pada awal tahun 2018 dan menjadi *The First Green Sovereign Sukuk in the World*. Pengakuan dunia terhadap *green sukuk* mengangkat citra Indonesia dalam implementasi mitigasi perubahan iklim. Meningkatnya peran *green sukuk* dalam pembiayaan pembangunan diharapkan memunculkan berbagai infrastruktur ramah lingkungan yang berperan mengurangi laju perubahan iklim. Sebagai instrumen pembiayaan yang relatif baru, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi agar penerbitan *green sukuk* di masa depan semakin baik. Kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian teknis perlu ditingkatkan agar *green sukuk* semakin banyak digunakan sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan. Dukungan masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen ini juga sangat diperlukan untuk mendukung program pemerintah terkait pembiayaan yang bersumber dari masyarakat.

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, inovasi pembiayaan, green sukuk.

PENDAHULUAN

Isu-isu terkait mitigasi perubahan iklim dan penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan terus menjadi topik yang menarik dalam berbagai pertemuan tingkat internasional. Demikian halnya dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia yang diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 14 Oktober 2018 di Bali. Isu tentang pembiayaan hijau yang merupakan bagian dari penerapan pembangunan berkelanjutan dibahas dalam satu sesi seminar tersendiri. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya isu tersebut.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut mengatakan bahwa Indonesia sangat berkepentingan terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah telah menyusun berbagai target agar dapat berkontribusi dalam penyelamatan bumi. Selain itu juga disiapkan berbagai instrumen pembiayaan yang memungkinkan para investor berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Saat ini instrumen investasi berbasis lingkungan hidup sangat diminati. Oleh karena itu, pemerintah serius mendorong pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan untuk menarik investor masuk ke pasar keuangan Indonesia. Daya tarik instrumen investasi ditingkatkan melalui berbagai pilihan proyek investasi.

Isu pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJPN disebutkan bahwa salah satu arah pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari diantaranya dengan mendayagunakan sumber daya alam yang terbarukan dan mengelola sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sedangkan dalam RPJMN disebutkan bahwa salah satu Agenda Pembangunan Pasca 2015 adalah pembangunan lingkungan yang

tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati disertai dengan adanya rumusan cara pencapaian (*means of implementation*).

Di tingkat internasional, isu ini telah ditetapkan secara resmi oleh PBB pada saat menyelenggarakan sidang umum tanggal 25 September 2015 di New York. Aksi terhadap perubahan iklim ditetapkan menjadi salah satu Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals/SDGs*) tahun 2015-2030.

Sebagai wujud peran aktif dalam mengatasi dampak perubahan iklim, Indonesia menjadi salah satu dari tiga puluh negara yang menjadi anggota *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* (SDG). Indonesia juga terlibat dalam Forum Tenaga Ahli (*Expert Forum*) penyusunan Konsep Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, yang menyusun langkah-langkah pembiayaan untuk pelaksanaan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Tujuan dalam SDGs yang berjumlah 13 tersebut juga telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan.

Indonesia sebenarnya bukan merupakan negara yang diwajibkan menentukan target penurunan emisi gas rumah kaca secara kuantitatif. Namun, Indonesia secara sukarela berinisiatif memberikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN GRK) melalui Perpres No. 61/2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi yang rencana aksinya sudah selesai disusun pada tahun 2013. Rencana pelaksanaan rencana mitigasi dan rencana adaptasi perubahan iklim pada berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019 dengan target penurunan emisi GRK sekitar 26 persen pada

tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah. Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah perlu menjadikan target penurunan emisi dan adaptasi GRK sebagai indikator kinerja dan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan.

Perpres No. 61/2011 tersebut menyatakan bahwa target penurunan emisi gas rumah kaca nasional hingga 26% menggunakan pendanaan sendiri yang bersumber dari APBN atau APBD. Kemudian, jika dibantu pendanaan internasional targetnya mencapai 41% di tahun 2020. Pada tahun 2016, kerangka regulasi di dalam Perpres tersebut direvisi menyesuaikan dengan ratifikasi *Paris Agreement* yang menghasilkan dokumen *Nationally Determined Contributions (NDC)* Indonesia, yang berisi penambahan target penurunan emisi menjadi 29% dan 41% di tahun 2030. Setiap tahun pemerintah menyampaikan secara resmi laporan kinerja realisasi penurunan emisi GRK kepada lembaga resmi PBB dalam kerangka *United Nation Convention on Climate Change* (UNFCCC).

Target penurunan emisi gas rumah kaca yang cukup menantang tersebut tentu memerlukan pendanaan yang cukup besar. Berdasarkan informasi dari *Third National Communication (TNC)* tahun 2017, biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang berikatan dengan penurunan emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim mencapai 81 milyar USD untuk rentang waktu tahun 2015-2020 atau diperlukan senilai 16,2 milyar USD per tahun. Sedangkan dana yang mampu dialokasikan oleh pemerintah untuk aksi mitigasi dan adaptasi saat ini senilai 55,1 miliar USD, sehingga masih terdapat *gap* pembiayaan yang cukup besar.

Untuk mengatasi *gap* pembiayaan tersebut, Pemerintah sebenarnya telah mengupayakan dengan berbagai bentuk inovasi pembiayaan. Di antara adalah dengan mekanisme *budget tagging*, yaitu suatu proses identifikasi pada belanja pemerintah khususnya pada proyek-proyek yang akan memberikan keuntungan secara spesifik sesuai

dengan tujuan pemerintah dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Hasil identifikasi tersebut pada tahun 2016-2017 berhasil meningkatkan alokasi belanja untuk pembangunan infrastruktur terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Total alokasi belanja pada tahun 2016-2017 senilai 11,6 miliar USD (BKF, 2017). Pemerintah saat ini terus mengupayakan adanya inovasi instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk aksi-aksi pengurangan dampak perubahan iklim sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

GREEN SUKUK: ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang (Sutamihardja, 2004). Konsep pembangunan ini memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan sehingga koordinasi, kemitraan dan sinergi di antara berbagai pihak adalah mutlak, baik pemerintah, swasta korporasi, maupun masyarakat.

Keterlibatan semua pemangku kepentingan tersebut juga dapat mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, terutama dukungan dari sisi pembiayaan. Keterlibatan para pemangku kepentingan dapat memunculkan berbagai skema kemitraan dalam implementasi pembangunan. Sehingga, beban pembiayaan tidak hanya bertumpu pada kemampuan fiskal pemerintah yang cukup terbatas.

Namun demikian, tidak dapat dielakkan bahwa peran dan fungsi pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan tetap dominan. Sebagai pemegang kebijakan fiskal, pemerintah menjalankan 3 fungsi utama yaitu: mengalokasikan faktor-faktor produksi dan menyediakan

kebutuhan masyarakat atas barang-barang publik secara efektif, mendistribusikan kemakmuran kepada masyarakat, dan mempertahankan tingkat penggunaan faktor-faktor produksi dan stabilisasi nilai uang (Musgrave and Musgrave, 1989). Pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari fungsi alokasi, sehingga pemerintah berkepentingan untuk melaksanakannya dengan berbagai sumber daya yang dimiliki.

Untuk mendanai pembangunan, dengan pertimbangan manfaat pembangunan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat menempuh kebijakan anggaran defisit. Hal ini seperti yang disampaikan Rahardja dan Manurung (2004) bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat anggaran defisit, yaitu dengan sengaja membuat belanja negara lebih besar dari pada pendapatan (G>T). Dalam kondisi di atas, pemerintah dapat mengalokasikan kebutuhan pembangunan dalam pos utang (pembiayaan). Menurut Barro (1989) dalam Anwar (2014) ada beberapa sebab terjadinya defisit anggaran, di antaranya adalah keinginan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Selanjutnya dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.

Kemudian, sesuai dengan amanah UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun 2018, Pemerintah memiliki

keleluasaan untuk memilih instrumen pembiayaan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit pemerintah dapat melakukan pinjaman tunai dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai sumber pembiayaan. SBN terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Selanjutnya, sebagai pedoman dalam melaksanakan program pembiayaan pemerintah juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 884/KMK.08/2017 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2018-2021. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa kebijakan umum pengelolaan utang diantaranya ditempuh dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap, melakukan pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang, serta mengoptimalkan pemanfaatan instrumen utang untuk pembiayaan kegiatan/proyek yang mendukung program pembangunan nasional.

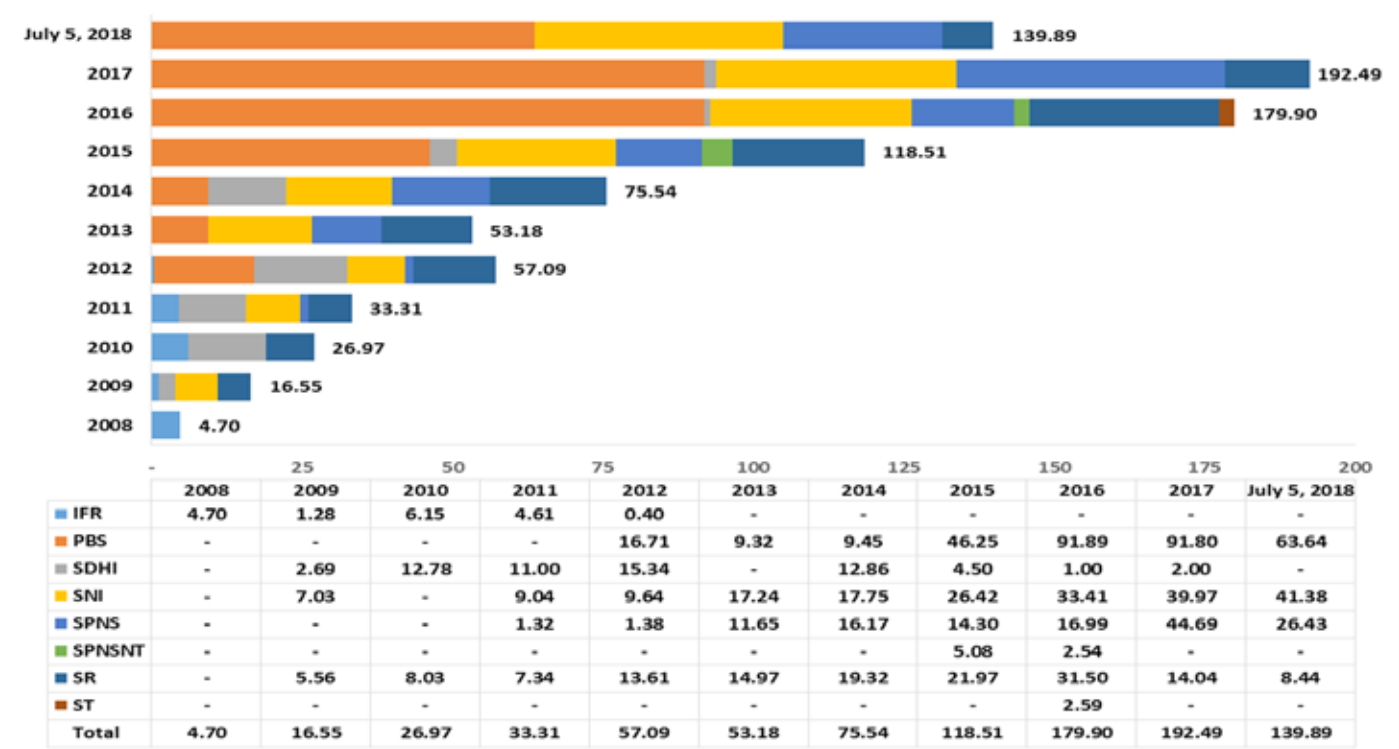
Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan umum pengelolaan utang tersebut, saat ini pemerintah terus melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan yang langsung dikaitkan dengan pembiayaan proyek. Salah satu diversifikasi instrumen pembiayaan tersebut adalah dengan menerbitkan SBSN atau Sukuk Negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN atau Sukuk Negara Pasal 4, disebutkan bahwa tujuan penerbitan SBSN selain untuk pembiayaan APBN secara umum, juga digunakan untuk pembiayaan proyek pemerintah. Hal ini sedikit berbeda dengan penerbitan SUN, sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2002 Tentang SUN tujuan penerbitan SUN tidak secara langsung tertulis sebagai instrumen pembiayaan proyek. Meskipun demikian,

tidak tertutup kemungkinan SUN untuk membiayai proyek Pemerintah.

Selain dari sisi tujuannya, ada perbedaan lain antara SUN dan SBSN, di antaranya bahwa SUN pada prinsipnya adalah surat pernyataan utang sedangkan SBSN adalah bukti penyertaan terhadap suatu aset atau modal (investasi) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU SBSN. Perbedaan prinsip inilah yang mengarahkan kebijakan penggunaan utang secara efektif termasuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan lebih ditujukan pada penggunaan SBSN, karena secara prinsip SBSN memerlukan adanya proyek/ kegiatan sebagai landasan penerbitannya. Namun, pemerintah saat ini juga tengah mengembangkan kemungkinan penerbitan *bonds* untuk *green financing*.

Penerbitan Sukuk Negara merupakan upaya pemerintah untuk memperoleh sumber pembiayaan baru dari sektor keuangan terutama keuangan syariah domestik maupun global yang berkembang pesat dalam beberapa

dekade terakhir. Pemerintah pertama kali menerbitkan Sukuk Negara pada tahun 2008. Penerbitan Sukuk Negara dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan, baik dari jumlah, jenis instrumen, variasi investor dan distribusi geografis investor. Setelah sepuluh tahun berkiprah dalam pembiayaan, peran Sukuk Negara saat ini semakin penting dalam menunjang keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*). Peran penting Sukuk Negara dapat dilihat dari jumlah penerbitan yang terus meningkat demikian juga proporsinya jika dibandingkan dengan instrumen pembiayaan lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.



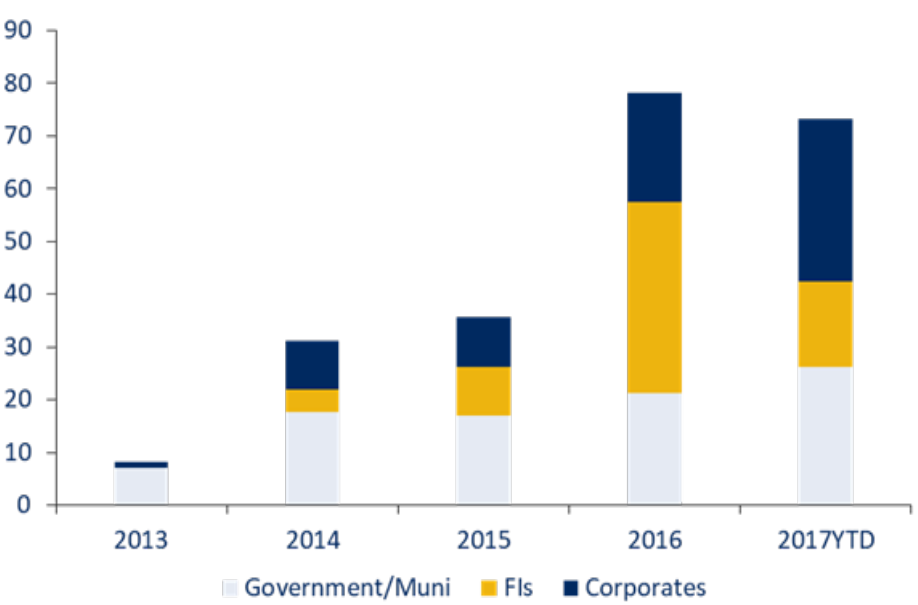
Gambar 1. Perkembangan Penerbitan SBSN Per 5 Juli 2018
Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR

Seiring pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketuai oleh Presiden RI, peran Sukuk Negara di masa depan akan terus ditingkatkan, bahkan diharapkan mencapai 50% dari total pembiayaan. Target ini tentu sangat menantang mengingat saat ini porsi penerbitan Sukuk Negara bila dibandingkan dengan total penerbitan SBN baru mencapai 18%. Saat ini SUN telah diterbitkan sebesar Rp2.951 triliun, sedangkan Sukuk Negara baru mencapai Rp651 triliun. Hal ini pula yang menjadi latar belakang pemilihan Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan dalam pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan Sukuk Negara selama ini menemui tantangan berupa sulitnya melakukan diversifikasi landasan penerbitan (*underlying asset*). Inovasi yang dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan *green sukuk* sebenarnya merupakan sebuah langkah untuk melakukan diversifikasi *underlying asset* dan basis investor. Adanya keperluan pembangunan proyek-proyek infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan menjadi berkah bagi pengembangan Sukuk Negara. Pengembangan jenis *underlying asset* memungkinkan Sukuk Negara berperan lebih banyak dalam pembiayaan APBN.

Penerbitan *green sukuk* untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan juga mengokohkan posisi Indonesia di pasar keuangan internasional sebagai penerbit *sovereign sukuk* terpercaya dan terus melakukan inovasi.

Penerbitan *green sukuk* di pasar keuangan internasional merupakan upaya memanfaatkan dinamika perkembangan investor dengan preferensi khusus. Seiring dengan meningkatnya kesadaran menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, muncul ceruk investor baru yang hanya berinvestasi pada instrumen keuangan yang dikategorikan *”green”*. Instrumen keuangan tersebut biasanya diterbitkan untuk pembiayaan infrastruktur atau kegiatan yang menunjang mitigasi perubahan iklim, seperti halnya *green bond* atau *green*



Gambar 2. Penerbitan Green Bond tahun 2013 - pertengahan 2017 (dalam milyar USD)
Sumber: Bloomberg, 14 September 2017

sukuk. Perkembangan *green bond* terus mengalami perkembangan pesat sejak instrumen ini dikenalkan pada tahun 2013. Sampai dengan pertengahan tahun 2017, volume pasar *green bond* mencapai 80 miliar USD. Jumlah ini diperkirakan terus mengalami peningkatan.

Penerbitan *green sukuk* di pasar keuangan internasional juga merupakan upaya memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara layak investasi (*investment grade*) oleh beberapa pemeringkat kredit internasional. Kondisi ini memungkinkan Indonesia memperoleh sumber pembiayaan yang lebih murah karena meningkatnya kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi domestik. Selain itu, penerbitan *green sukuk* juga dapat dijadikan sarana menarik investasi dalam mata uang USD ke dalam negeri. Namun demikian, tetap harus memperhatikan berbagai risiko yang ada seperti: risiko nilai tukar dan *capital flight*.

Penerbitan *green sukuk* pada awal tahun 2018 menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim.

Penerbitan *Green Sukuk* ini diharapkan berdampak terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan karena dana hasil penerbitan (*proceeds*) digunakan untuk pembiayaan infrastruktur berkategori ramah lingkungan sehingga menghasilkan dampak ganda sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan penjelasan pemerintah, ada beberapa kategori proyek yang dapat dibiayai melalui penerbitan *green sukuk*, sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.

Kategori	Jenis proyek
Dark Green	Energi terbarukan, ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rawan bencana
Medium to Dark Green	Pengelolaan sampah dan energi, pertanian dan transportasi berkelanjutan, ekowisata
Light to Dark Green	Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
Light to Medium Green	Penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk pembangkit listrik
Light Green	Bangunan ramah lingkungan

Tabel 1. Kategori Green Projects
Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah (2018) dan Green Framework

Untuk memastikan bahwa proyek yang akan dilaksanakan memenuhi kriteria, proyek-proyek yang telah dipilih harus melalui proses *review* dan persetujuan institusi independen untuk melakukan seleksi terhadap proyek-proyek yang diajukan. Institusi tersebut diantaranya adalah the *Center for International Climate and Environmental Research at the University of Oslo* (CICERO) salah satu lembaga pemeringkat terkemuka dunia berbasis di Norwegia yang bertugas memberikan opini dan pedoman untuk memilih proyek-proyek yang sesuai dengan persyaratan investasi dalam *Green Bond Framework*. Dalam penerbitan *green sukuk* pada tahun 2018 ini, proyek-proyek yang diajukan untuk dibiayai telah melewati tahapan *review* secara mendalam oleh CICERO. Di tahun 2016, CICERO mendapatkan pengakuan dari *Climate Bonds Initiative* serta di tahun 2017 mendapatkan anugerah *the best external reviewer in the worlds* untuk bidang penerbitan *green bonds* dan sukuk negara, dari lembaga Environmental Finance.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, proyek ramah lingkungan yang berencana didanai *green sukuk* tahun

2018 terdapat di empat kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun proyek yang dimaksud misalnya proyek pengendalian banjir, pengelolaan drainase utama perkotaan dan pengamanan pantai senilai Rp 501 miliar di Kementerian PUPR. Selain itu, proyek pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api bernilai Rp 165 miliar di Kementerian Perhubungan (katadata, 2018).

Green Sukuk Indonesia yang diterbitkan pada pada bulan Maret 2018 tercatat sebagai *The First Green Sovereign Sukuk in the World*. Sukuk ini diterbitkan senilai 1,25 milyar USD dengan tenor 5 tahun, imbalan tetap 3,75% per tahun serta menggunakan akad wakalah. Banyak pihak menilai bahwa pemberian imbalan sebesar 3,75% dengan tenor 5 tahun merupakan bukti bahwa masuknya Indonesia dalam peringkat investasi memberikan dampak terhadap turunnya tingkat imbalan yang harus diberikan kepada investor.

Penerbitan *green sukuk* juga memberikan beberapa keuntungan bagi pemerintah di antaranya adalah: (1) meningkatkan reputasi pemerintah karena banyaknya perhatian tertuju dengan prestasi sebagai penerbit *green sovereign sukuk* pertama di dunia, (2) membuktikan kepada pasar keuangan dunia bahwa pemerintah terus melakukan inovasi sumber-sumber pembiayaan, dan (3) mempromosikan insiatif pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi komitmen pemerintah.

TANTANGAN DAN INISIATIF STRATEGIS MENDATANG

Sebagai instrumen pembiayaan yang relatif baru, *green sukuk* masih belum dikenal luas oleh *stakeholders* Kementerian Keuangan terutama satuan kerja di Kementerian/Lembaga. Informasi yang diperoleh dari Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR saat ini belum semua satker memahami secara



Gambar 3. Penerbitan Green Sukuk Indonesia
Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR, 2018

menyeluruh proses bisnis *green sukuk*. Kekurangpahaman satker terhadap *green sukuk* dapat menjadi penghambat dalam proses penyiapan proyek-proyek yang akan digunakan sebagai *underlying asset*. Sebagaimana disebutkan di atas, ada kategori khusus untuk proyek yang akan digunakan dalam penerbitan *green sukuk*. Untuk itu, kegiatan edukasi dan bimbingan kepada satker merupakan kegiatan yang sebaiknya terus dilakukan. Pemahaman satker terhadap proses bisnis *green sukuk* akan sangat menunjang kesuksesan *green sukuk* dari tahap persiapan, penggunaan hasil penerbitan, dan pelaporan kegiatan.

Tantangan lain adalah pada sisi pelaporan proyek terkait perkembangan pembangunan dan mengetahui manfaat proyek tersebut untuk mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Pelaporan mengenai hal tersebut disyaratkan oleh beberapa lembaga *review* seperti halnya CICERO. Untuk mengatasi

hal ini, koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan para satker perlu ditingkatkan terutama untuk menyepakati indikator-indikator yang digunakan dalam pelaporan dan menilai dampak dari pembangunan proyek tersebut. Jika diperlukan, pemerintah dapat pula bekerja sama dengan *independent reviewer* dalam proses *monitoring* dan pelaporan sehingga memenuhi kriteria yang diharapkan.

Kebijakan pembangunan ekonomi “*pro-green*” yang telah dicanangkan sejak tahun 2010 layak untuk dilanjutkan dengan berbagai kebijakan, meskipun pimpinan pemerintahan terus mengalami pergantian sesuai dengan periodenya. Pembangunan ekonomi yang memerhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan diharapkan akan memberikan benefit bagi kesejahteraan masyarakat di masa kini dan akan datang. Pada tahun 2014, Bappenas telah meluncurkan “Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep *Green Economy*” yang bertujuan

menjadi petunjuk dalam pengembangan ekonomi berwawasan lingkungan dengan sasaran awal “menghijaukan” sektor industri, transportasi, energi dan sektor berbasis lahan (pertanian dan kehutanan). Diharapkan prakarsa ini dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya-upaya pengurangan emisi karbon dan adaptasi dampak perubahan iklim.

Di sisi fiskal upaya-upaya melakukan inovasi sumber pembiayaan perlu terus dilakukan untuk memberikan dukungan terealisasinya aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sesuai dengan target dari Komite Nasional Keuangan Syariah yang diketuai oleh Presiden RI, secara bertahap penerbitan Sukuk Negara akan terus ditingkatkan seiring dengan kemampuan pasar keuangan. Peningkatan penerbitan ini diharapkan akan ikut menambah porsi penerbitan Sukuk Negara yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur yang dikategorikan sebagai infrastruktur hijau.

Selain sukuk, pemerintah juga perlu untuk mendorong sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan bentuk pembiayaan kerja sama (*partnership*) yang melibatkan sektor swasta atau BUMN misalnya dalam pembangunan infrastruktur yang dikategorikan hijau.

Terakhir, peran masyarakat Indonesia dalam mendukung program-program pemerintah dalam mengurangi dampak perubahan lingkungan sangat diperlukan. Masyarakat dapat ikut dalam membiayai program pembangunan berkelanjutan misalnya dengan ikut berinvenstasi pada Sukuk Negara yang diterbitkan oleh pemerintah.



Gambar 4. Jalur Trans Sulawesi (Salah Satu Contoh Green Infrastructure)
Foto: tribunmakassar.com

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

Sebagai upaya ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagai mana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah turut aktif menjadi salah satu dari tiga puluh negara yang menjadi anggota *Open Working Group* (OWG) *on Sustainable Development Goals* (SDGs). Satu dari tiga belas tujuan SDGs adalah mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

Pemerintah menyadari bahwa peran serta dalam memitigasi perubahan iklim dan dampaknya memerlukan biaya yang cukup besar. Agar tujuan pembangunan nasional dan peran serta dalam mitigasi perubahan iklim dapat dijalankan secara bersamaan, Pemerintah memerlukan inovasi sumber pembiayaan.

Salah satu inovasi pembiayaan tersebut adalah dengan menerbitkan *green sukuk* pada awal tahun 2018. Selain untuk tujuan tersebut di atas, penerbitan *green sukuk* juga berhasil meraih beberapa tujuan lain, misalnya: diversifikasi basis investor SBN, diversifikasi *underlying asset* penerbitan Sukuk Negara, serta meningkatkan peran Sukuk Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

Pemerintah selayaknya terus mengembangkan penerbitan *green sukuk*. Pengembangan tersebut akan semakin baik apabila pemerintah dapat melakukan koordinasi yang harmonis dengan kementerian teknis. Untuk itu, upaya melakukan diseminasi informasi dan peningkatan koordinasi dengan kementerian teknis layaknya terus ditingkatkan guna mengatasi tantangan seperti penyediaan *underlying asset*, *progress* penyerapan pembiayaan, dan laporan perkembangan proyek.

Perlu dipertimbangkan pula untuk mendorong kelayakan pemerintah daerah dalam menerbitkan *green sukuk* guna mengatasi problem kota-kota besar, misalnya terkait sampah. *Green Sukuk* dapat digunakan untuk pembiayaan proyek daur ulang sampah, sehingga dapat menjadi solusi terbatasnya lahan pembuangan sampah terutama di kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzi.A. 2004, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hariyanto, Eri. 2016, Mengenal Sukuk Negara: Instrumen Pembiayaan APBN dan Sarana Investasi Masyarakat, Gava Media, Yogyakarta

Manurung, Mandala, dan Pratama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter* (Kajian Kontekstual Indonesia). Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.

Suminto, 2018, Materi Presentasi The 3rd Annual Islamic Finance Conference: Green Sukuk, Financing The Future, Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR, Jakarta

Sutamihardja, 2004 Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pejuang-penerbitan-green-sukuk/> diakses tanggal 10 Juli 2018 pukul 09.15 WIB

<http://www.beritasatu.com/investor/484114-green-sukuk-dan-era-baru-pendanaan-lingkungan.html> diakses tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.25 WIB

<https://katadata.co.id/berita/2018/02/26/jadi-pionir-penerbit-green-sukuk-di-asia-indonesia-raup-us-3-miliar> diakses tanggal 11 Juli 2018 pukul 14.07 WIB

<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20181010/281852939523637> diakses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 09.10 WIB

KOKO INARTO
WIDYAISWARA BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR

MEMBEDAH PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DI DESA TAHUN 2018

“Saya meminta program pemanfaatan dana desa dan program kementerian yang dikucurkan ke desa dilakukan dengan model padat karya. Model *cash for work*’.”

Demikian amanat Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas pemanfaatan dana desa di kantor presiden tanggal 3 November 2017. Presiden meminta pengelolaan dana desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah menginginkan akselerasi pengentasan kemiskinan dan menekan angka Indeks Gini yang melambangkan kesenjangan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara singkat, Indeks Gini pedesaan sejak dilaksanakannya pemberian dana desa pada tahun 2015 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 sebelum dana desa diberikan, angka Indeks Gini mencetak tingkat tertinggi di angka 0,34. Angka ini terus menurun ke 0,33 di 2015 dan 0,32 pada 2016 dan 2017. Ini menunjukkan bahwa dana desa dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan di pedesaan.



Gambar 1. Indeks Gini Pedesaan Tahun 2007 -2017
Sumber: Buku Saku Dana Desa, DJPK

Jika dicermati, terdapat lima esensi pengelolaan keuangan desa sesuai PP Nomor 43/2014 jo. 47/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pertama, pengelolaan dana desa yang melibatkan elemen pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Kedua, pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang dari sisi pendapatan memuat Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer. Ketiga, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan dibantu Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kemudian, keempat, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin. Terakhir, yang kelima, pembinaan dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Pembinaan dan pengawasan keuangan desa harus dimulai dari sisi perencanaan yang dilakukan dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa (Perdes) APB Desa. Rancangan tersebut disusun sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan dievaluasi oleh bupati atau walikota yang bersangkutan. Pada saat pelaksanaan, dana desa harus disimpan dalam rekening kas desa yang telah terdaftar. Kepala desa harus menunjuk dan melantik bendahara desa untuk melaksanakan penatausahaan. Kemudian, pemerintah desa harus melaksanakan pelaporan secara semesteran dan tahunan sesuai peraturan yang berlaku.

LATAR BELAKANG KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA

Pemerintah mengatur kebijakan dana desa untuk tahun 2018 difokuskan untuk kegiatan yang bersifat padat karya tunai di desa. Kebijakan ini untuk mengurangi angka pengangguran di desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Lebih lanjut, dana desa diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, jumlah kasus gizi buruk, angka urbanisasi, dan menekan Indeks Gini nasional. Dalam

praktiknya, pelaksanaan padat karya ini dilakukan dengan menyiapkan Alokasi Upah Masyarakat. Jumlah alokasi tersebut minimal 30% dari Dana Desa yang diterima dan bentuknya berupa Alokasi Harian Orang Kerja (HOK).

Kebijakan ini tentu harus mengubah alokasi HOK RKP Desa tahun 2018 yang telah disusun pada 2017. Sesuai Juknis Kemendes PDTT, setiap desa dapat melakukan perubahan tersebut dengan mengubah atau mengganti kegiatan ke arah pro padat karya. Selain itu, desa dapat menggeser atau menambah alokasi dari belanja lainnya dalam satu kegiatan. Sehingga, desa harus mengubah dokumen Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades) sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan tersebut. Substansi peraturan-peraturan dimaksud meliputi perubahan RKP Desa termasuk lampiran RAB-nya, perubahan APB Desa, dan perubahan penjabaran APB Desa.

BAGAIMANA KONSEP ALOKASI HOK 30%?

Kemendes PDTT telah mengeluarkan juknis mengenai cara penghitungan alokasi HOK. Pertama, jumlah 30% dihitung dari jumlah dana desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Desa. Kedua, jumlah 30% mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pengertian tenaga kerja tersebut mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat setempat sebagai sasaran padat karya. Besaran upah tenaga kerja berdasarkan batas bawah dan batas atas upah seuai kesepakatan Musyawarah Desa (Musdes). Besaran tersebut tetap harus mengacu pada peraturan bupati/walikota yang mengatur besaran upah tenaga kerja.

Selanjutnya, kegiatan yang harus dilakukan pemerintah desa adalah pendataan calon sasaran dan peninjauan kembali RKP dan APB Desa. Calon sasaran adalah masyarakat desa yang berpotensi untuk menjadi tenaga kerja

yang saat ini berstatus penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin. Menurut BPS, pengangguran terbuka (*unemployment*) adalah mereka yang tidak bekerja tetapi berharap mendapatkan pekerjaan. Pengertian tersebut termasuk sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah bekerja tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan, setengah penganggur (*underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan. Kemudian, warga miskin atau penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut rilis BPS bulan Juni 2018, jumlah penduduk miskin secara nasional pada September 2017 sebanyak 26,58 juta orang. Sedangkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2018 sebanyak 6,87 juta orang atau 5,13% (turun 0,20 poin dibanding Februari 2017). Dan, 9,70 juta orang (7,64 %) penduduk bekerja yang berstatus setengah penganggur.

Peninjauan Kembali RKP dan APB Desa tahun 2018 harus dilakukan karena kebijakan kegiatan padat karya tunai harus masuk di dalamnya. Peninjauan ini dilaksanakan setelah pemerintah desa mengetahui jumlah calon sasaran tenaga kerja dengan terperinci. Untuk desa yang telah menetapkan APB Desa Tahun 2018, desa tersebut harus mengubah RKP dan APB Desanya. Sedangkan, untuk desa yang belum menetapkan APB Desa, desa harus mengubah RKP Desa dan segera menetapkan APB Desanya.

TEKNIS PERUBAHAN RKP DESA, APB DESA, DAN PENJABARANNYA

Untuk mengubah RKP Desa, desa tetap harus memperhatikan pasal 49 Permendagri Nomor 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. RKP Desa dapat diubah jika terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan. Selain itu, apabila

¹Kuwado, Fabian Januarius. Pimpin Rapat Dana Desa, Ini Instruksi Jokowi. 03 November 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/16464771/pimpin-rapat-dana-desa-ini-instruksi-jokowi>. (diakses 8 Juni 2018)

terdapat perubahan mendasar kebijakan pemerintah di atasnya, pemerintah desa dapat mengubah RKP Desanya. Jika mencermati bahwa padat karya tunai merupakan kebijakan presiden, maka disimpulkan bahwa perubahan kebijakan merupakan dasar perubahan RKP Desa tersebut. Untuk melaksanakannya, sesuai pada pasal 49 ayat 3 Permendagri Nomor 114/2014, desa harus melakukan beberapa tahapan kegiatan. Tahapan tersebut dimulai dari pengumpulan dokumen kebijakan pemerintah yang mendasarinya dan pengkajian ulang kegiatan pembangunan yang terdampak. Kemudian, pemerintah desa menuangkan hasilnya dalam rancangan kegiatan yang dilengkapi dengan RAB dan menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pemerintah desa menyusun perubahan RKP Desa, mengubah dan menyusun kembali APB Desa beserta penjabarannya sesuai dengan mekanismenya masing-masing. Mekanisme perubahan RKP Desa dimulai dari penghitungan ulang untuk memastikan sudah terdapat alokasi upah tenaga kerja 30%. Alokasi tersebut dilakukan dengan *refocusing* atau mengurangi jumlah kegiatan pembangunan menjadi minimal 3 dan maksimal 5 kegiatan pembangunan Desa. *Refocusing* tersebut harus disepakati lewat Musdes. Hasil Musdes wajib dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hasil Musrenbangdes menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang RKP Desa Perubahan Tahun 2018.

Sesuai dengan mekanisme di atas, pemerintah desa menuangkan perubahan tersebut dengan format dokumen yang tercantum Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, yaitu:

1. Berita Acara Penyusunan Perubahan RKP Desa melalui Musdes (Lampiran XVII)
2. Pagu Indikatif Desa (apabila terdapat perubahan pagu) (Lampiran XVIII)
3. Daftar Rencana Program/Kegiatan

- Pemerintah di atasnya yang masuk ke desa (Lampiran XIX)
4. Rancangan Perubahan RKP Desa (Lampiran XX)
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Lampiran XXIII)
 6. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB (Lampiran XXIV)
 7. Berita Acara Penyusunan Perubahan RKP Desa (Lampiran XXVI)
 8. Berita Acara Penyusunan Perubahan RKP Desa melalui Musrenbangdes (Lampiran XXVII)

Setelah Perdes Perubahan RKP Desa ditetapkan, mekanisme perubahan atau penyusunan APB Desa tahun 2018 dilakukan dengan 2 kondisi. Jika desa belum menetapkan APB Desa, maka Kepala Desa dan BPD menyusun APB Desa sesuai dengan Perdes Perubahan RKP Desa. Jika desa telah menetapkan APB Desa, maka Kepala Desa dan BPD melakukan Perubahan APB Desa sesuai dengan Perdes RKP Desa Perubahan. Kemudian, Kepala Desa mengajukan rancangan Perubahan APB Desa untuk direview oleh Bupati/Walikota. Apabila rancangan disetujui, Kepala Desa dan BPD menetapkan Perdes Perubahan APB Desa.

Proses perubahan RKP Desa dan APB Desa di atas harus tetap mengikuti siklus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keterlibatan warga desa dalam Musdes dan Musrenbangdes harus dikedepankan untuk membantu pemerintah desa menentukan fokus padat karya di desanya masing-masing. Proses penetapan dan pertanggungjawaban APB Desa harus tetap menjamin terwujudnya unsur transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, diperlukan peraturan pengelolaan keuangan desa yang khusus memayungi kegiatan padat karya agar penggunaan anggarannya tertib dan disiplin. Untuk itu, dalam rangka implementasi kebijakan padat karya tunai, Kemendagri mengubah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan uraian pada Tabel 1.

PERUBAHAN DALAM HAL MEKANISME PERUBAHAN APB DESA BESERTA PENJABARANNYA	
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Pasal 33 Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa	Pasal 40 Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan; sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati/WaliKota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
PERUBAHAN PENGATURAN PERDES TENTANG APB DESA DAN PERKADES TENTANG PENJABARAN APB DESA	
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
LAMPIRAN Format Peraturan Desa tentang APB Desa pada setiap bidang belanja dibuat secara rinci.	LAMPIRAN Format Peraturan Desa APB Desa pada setiap bidang belanja hanya berisi besarannya. LAMPIRAN D. Teknis Penyusunan APB Desa 3. Cara mengisi format APB Desa b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas subbidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa (diatur dengan Perkades).

POLA PELAKSANAAN ANGGARAN DENGAN MENGUTAMAKAN SWAKELOLA	
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Pasal 32	Pasal 52
Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
(tidak mengatur secara tegas melalui penyedia atau swakelola)	(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
	(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Tabel 1. Perbandingan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang Terkait Dengan Program Padat Karya Tunai Desa

PENUTUP

Payung hukum pelaksanaan padat karya tunai di desa dari segi pedoman pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa sudah cukup mumpuni. Tantangan saat ini adalah bagaimana mengedukasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota terkait beserta pemerintah desanya. Hal itu tercermin dari hasil evaluasi program padat karya tunai tahap I yang dilakukan oleh Kemenko PMK. Menurut evaluasi tersebut, program ini berjalan lamban dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman desa/kecamatan mengenai dasar hukum HOK 30%².

Selain itu, salah satu hal yang menarik pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 prioritas pelaksanaan padat karya melalui swakelola. Swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat. Swakelola mengutamakan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat tentunya akan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Menteri Desa PDTT juga menegaskan bahwa fokus

dana desa dengan swakelola diharapkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan tetap mengawasi penggunaannya dengan sebaik-baiknya³. Untuk itu, setiap pemerintah desa harus selalu meningkatkan kemampuan dan pemahaman mereka dalam melaksanakan kegiatan padat karya tunai secara swakelola tersebut. Edukasi berkelanjutan untuk perangkat desa harus senantiasa dilakukan agar penggunaan anggaran dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin. Sehingga, dana desa yang dikucurkan dapat menjawab pertanyaan apakah pelaksanaan padat karya tunai benar-benar dapat mengentaskan kemiskinan di desa.

REFERENSI

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai.

Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi BPS Edisi 97 Juni 2018.

DJPK. *Dana Desa Dengan Skema Cash For Work* (Media Keuangan Volume XIII/No. 125/Februari 2018). Jakarta: Kementerian Keuangan. ISSN 1907-6320.

Kementerian Keuangan. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. November 2017. Jakarta: Kementerian Keuangan.

DJPK. *Buku Saku Dana Desa*. November 2017. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

RIYANTO
WIDYAISWARA PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

MENGUKUR KEPUASAN PESERTA PELATIHAN ATAS KINERJA PENGAJAR DENGAN MENGGUNAKAN CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI)

STUDI KASUS PELATIHAN TEMATIS KUASA PENGGUNA ANGGARAN ANGKATAN III TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK

Kegiatan pelatihan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi pelatihan dilakukan terhadap penyelenggaraannya, capaian hasil pelatihan para peserta, dan kinerja para pengajarnya. Penelitian ini mengukur kinerja pengajar pada Pelatihan Tematis Kuasa Pengguna Anggaran Angkatan III Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan *Customer Satisfaction Index* (CSI) atau indeks kepuasan pelanggan. Indeks ini diperoleh berdasarkan persepsi peserta pelatihan terhadap kinerja pengajar, yaitu pengetahuan pengajar atas materi yang dibawakan dan kemampuan pengajar menyampaikan materi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta bahwa seluruh pengajar, baik per individu maupun gabungan, menunjukkan indeks > 0,81. Hal ini menunjukkan kinerja pengajar sangat memuaskan.

Kata kunci: pelatihan, kepuasan, customer satisfaction index

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah organisasi menempati posisi yang sangat strategis, bahkan ada yang menyebut SDM sebagai salah satu wujud dari aset. Aset adalah harta yang dimiliki dan menjadi hak organisasi. Aset berupa SDM ini kemudian dikenal dengan sebutan *human capital*. Sebagai sebuah aset, keberadaannya harus selalu dipertahankan agar tingkat utilitasnya senantiasa optimal. Salah satu cara mempertahankannya adalah melalui pelatihan.

Salah satu bentuk dari pendidikan berupa pelatihan. Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2033 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai sebuah rangkaian kegiatan terencana, pelatihan mengikuti siklus manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Evaluasi pelatihan adalah suatu proses pengumpulan informasi secara sistematis, baik informasi yang bersifat deskriptif maupun *judgemental* yang diharapkan

dapat membantu dalam mengambil keputusan secara efektif, dalam hal pemilihan, adopsi, maupun modifikasi terhadap berbagai kegiatan operasional dalam organisasi (Goldstein; 1993). Salah satu aspek penting yang dievaluasi dalam pelatihan adalah evaluasi terhadap kinerja pengajar. Karena output kinerja pengajar adalah adalah layanan/jasa, maka untuk mengukurnya dilakukan dengan cara menilai persepsi peserta pelatihan terhadap kompetensi yang dimilikinya.

Aparatur pemerintah yang bertugas sebagai pengajar pada kementerian/ lembaga disebut widyaiswara. Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 22 tahun 2014 menyatakan bahwa kompetensi widyaiswara adalah

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan fungsional widyaiswara yang meliputi kompetensi pengelolaan pembelajaran, substansi, kepribadian, dan sosial. Hal ini berarti seorang widyaiswara tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga kompetensi untuk mengelola pengetahuan dan keterampilannya tersebut dalam proses pembelajaran, serta berkepribadian baik dan berjiwa sosial.

Pada BPPK, komponen kompetensi widyaiswara diukur dengan menggunakan dua aspek, yaitu pengetahuan pengajar atas materi yang disampaikan, dan kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi. Komponen pertama mengandung arti pemahaman materi, kedalaman materi, dan *expertise* pengajar atas materi yang dibawakan, meliputi *knowledge* dan *skill*. Sedangkan komponen kedua mengandung arti *how to deliver knowledge and skill* tersebut.

Indeks Kepuasan Pelanggan atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Pelanggan yang dimaksud bisa masyarakat, pengguna layanan pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya. CSI mengukur kepuasan pelanggan berdasarkan tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) dengan menggunakan rumus tertentu. Metode CSI digunakan dengan pertimbangan bahwa metode ini sangat mudah diterapkan, rekapitulasi nilai tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dimasukkan dalam rumus tertentu, dan hasilnya berupa indeks yang mudah diinterpretasikan. Bahkan CSI telah diadopsi kementerian keuangan sebagai metode untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 1329 tahun 2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian

yaitu “bagaimana mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan atas kinerja pengajar dengan menggunakan *Customer Satisfaction Index* (CSI)?”.

MANFAAT DAN TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan atas kinerja pengajar, khususnya pada Pelatihan Tematis Kuasa Pengguna Anggaran Angkatan III yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan *Customer Satisfaction Index* (CSI). Adapun manfaat yang diharapkan adalah agar para pengajar memperoleh informasi tentang kinerjanya di depan kelas. Pengajar yang telah memperoleh indeks kepuasan yang baik diharapkan dapat mempertahankan kinerjanya, sedangkan bagi pengajar yang belum memperoleh indeks kepuasan yang kurang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya.

KAJIAN LITERATUR

Secara umum pengertian pelatihan adalah serangkaian pendidikan dan pelatihan yang mengutamakan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Mondy dan Noe (2005;202) dalam Rizka (2012) pelatihan adalah “*activities designed to provide learners with the knowledge and skill needed for their present jobs*”, artinya pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk penyiapan calon pegawai agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Hal yang sama dinyatakan oleh Dessler (2008;248) dalam Rizka (2012) bahwa “*training means a new or present employees the skills they need to perform their jobs*”.

Laird (1978;9) dalam Rizka (2012) berpendapat bahwa “*training is described as activities which are designed to improve human performance on the job employee is presently doing or is being hired to do*”. Sedangkan Kenneth R. Robinson dalam Atmowirjo (1993;2) menyatakan

bahwa “*training, therefore we are seeking by any instructional or experiential means to develop a person behavior pattern in the areas of knowledge, skill, or attitude in order to achieve a desired standard*”. Terkait dengan pengertian tersebut, Atmowirjo menambahkan bahwa pelatihan adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang terprogram dan terencana yang terjadi baik dalam ruangan tertentu atau di lapangan.

Secara spesifik, Grundy and Brown (2003;12) dalam Rizka (2012) menjelaskan bahwa “*training can be defined as a deliberate and programmed activity aimed at improving once or more specific skills, either of the job or on the job, which can either be a group or individual activity, depending on the situation*”. Lebih lanjut, Oemar Hamalik (2007;10) berpendapat bahwa pelatihan pada hakikatnya mengandung unsur-unsur pembinaan dan pendidikan. Dari pendapat para pakar tersebut di atas, dapat diambil simpulan bahwa pelatihan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan dalam rangka untuk memodifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman belajar untuk mencapai hasil yang efektif dalam suatu pekerjaan.

Pelatihan memiliki siklus manajerial, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi pelatihan didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi secara sistematis, baik informasi yang bersifat deskriptif maupun *judgemental* yang diharapkan dapat membantu dalam mengambil keputusan secara efektif, dalam hal pemilihan, adopsi, maupun modifikasi terhadap berbagai kegiatan operasional dalam organisasi (Goldstein; 1993). Definisi evaluasi pelatihan juga sebagai suatu proses pengumpulan keluaran yang dibutuhkan untuk menilai apakah sebuah program pelatihan sudah efektif atau belum (Noe;2002 dalam Detty dkk;2008).

Salah satu aspek penting yang dievaluasi dalam pelatihan adalah evaluasi terhadap kinerja pengajar. Output kinerja pengajar adalah adalah layanan/jasa, oleh karena itu untuk mengukurnya harus dengan

cara menilai persepsi peserta pelatihan terhadap kompetensi yang dimilikinya. Menurut Desmita (2005) dalam Aminah (2008) persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menafsirkan pola stimulus ke dalam lingkungannya. Definisi ini mengandung arti bahwa persepsi dapat dilakukan dengan cara menggabungkan data-data indera yang diperoleh selama melakukan pengamatan sehingga individu menjadi mengetahui, mengerti dan memiliki kesadaran terhadap segala sesuatu isi lingkungannya yang menjadi obyek pengamatan tersebut.

Persepsi tidak hanya sekedar proses penginderaan, tetapi di dalamnya terdapat pengorganisasian dan pengamatan yang bersifat psikologis. Irwanto (1996) dalam Aminah (2008;8) menjabarkan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

Perhatian yang selektif, artinya tidak semua rangsangan atau stimulus harus ditanggapi tetapi individu cukup memusatkan perhatian pada rangsangan tertentu saja.

Ciri-ciri rangsang, artinya intensitas rangsang yang paling kuat dan rangsang yang bergerak/dinamis lebih menarik perhatian untuk diamati.

Nilai-nilai dan kebutuhan individu, artinya antara individu yang satu dengan yang lain tidak sama karena tergantung pada nilai hidup yang dianut dan kebutuhannya. Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunia sekitarnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik simpulan bahwa persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak dan terjadilah proses psikologis sehingga individu dapat menyadari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan sebagainya. Dari proses itulah kemudian individu mengalami proses

persepsi. Dari beberapa penjelasan di atas yang di maksud dengan persepsi dalam penelitian ini adalah proses pengamatan, pengenalan, penarikan kesimpulan dan penilaian yang dilakukan oleh peserta pelatihan.

Pengertian dasar dari kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Uzer Usman (2004) dalam Aminah (2008) mengungkapkan bahwa “*competency is descriptive of qualitative nature or teacher behavior appears to be entirely meaningful*.” Definisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi adalah suatu gambaran kualitatif dari perilaku seorang guru yang mempunyai peranan sangat penting. Jadi, kompetensi pengajar berarti kemampuan atau kecakapan seseorang untuk dapat mengajar.

Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 22 tahun 2014 menyatakan bahwa widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah. Selanjutnya pada pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri PAN dan RB tersebut menyatakan bahwa kompetensi widyaiswara adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan fungsional widyaiswara yang meliputi kompetensi pengelolaan pembelajaran, substansi, kepribadian, dan sosial. Hal ini berarti seorang widyaiswara tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga kompetensi untuk mengelola pengetahuan dan keterampilannya tersebut dalam proses pembelajaran, serta berkepribadian baik dan berjiwa sosial.

METODE PENGUKURAN

1. Objek Pengukuran dan Prosedur Pengumpulan Data

Pelatihan Tematis Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Angkatan III merupakan salah satu pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada awal tahun anggaran 2018. Tulisan ini akan mengukur kepuasan peserta berdasarkan hasil evaluasi peserta pelatihan terhadap kinerja pengajar (widyaiswara dan non widyaiswara), dengan menyebar kuesioner oleh bidang evaluasi, pelaporan, dan kinerja (evalapkin) pusdiklat. Penyebaran kuesioner dilakukan sekaligus pada awal penyelenggaraan, dimana pada awal penyelenggaraan peserta diminta untuk mengisi tingkat kepentingan atau harapan peserta terhadap kinerja pengajar, dan pada akhir penyelenggaraan peserta diminta untuk mengisi tingkat kinerja pengajar yang dirasakan oleh peserta.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisi dua pertanyaan berdasarkan tingkat kepentingan (*importance/I*) peserta atas kinerja pengajar. Tingkat kepentingan merupakan harapan pada setiap aspek kinerja pengajar yang diinginkan oleh peserta. Selanjutnya, pada kuesioner yang sama peserta diminta untuk mengisi tingkat kinerja (*performance/P*) pengajar berdasarkan pengalaman yang dirasakan peserta selama mengikuti pelatihan.

2. Metode Pengujian/ Analisis Data

Pengolahan hasil survey pada artikel ini menggunakan *Customer Satisfaction Index (CSI)*. Metode *Customer Satisfaction Index (CSI)* atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan analisis kuantitatif berupa persentase pengguna yang senang (puas) dalam suatu survei kepuasan pengguna. IKM digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna (tingkat kepuasan masyarakat) secara menyeluruh dengan memperhatikan tingkat kepentingan dan kinerja dari aspek-aspek barang dan jasa/layanan. Pengukuran kepuasan dengan metode IKM ini bersumber dari keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

CSI dihitung dengan rumus:

$$CSI = (T/5Y) \times 100 \%$$

Keterangan:

- CSI = *Customer Satisfaction Index*
- T = Hasil kali antara jumlah rata-rata kepentingan dengan rata-rata kinerja ($\Sigma I \times P$)
- 5Y = 5 x jumlah rata-rata kepentingan ($5 \times \Sigma I$).

Kriteria nilai *Customer Satisfaction Index (CSI)*:

Nilai CSI	Kriteria CSI
0,81 – 1,00	Sangat Puas
0,66 – 0,80	Puas
0,51 – 0,65	Cukup Puas
0,35 – 0,50	Kurang Puas
0,00 – 0,34	Tidak Puas

Tabel 1. Kriteria Nilai CSI
Sumber: KMK Nomor 1329/KMK.01/2015

ANALISIS TEMUAN DAN PEMBAHASAN

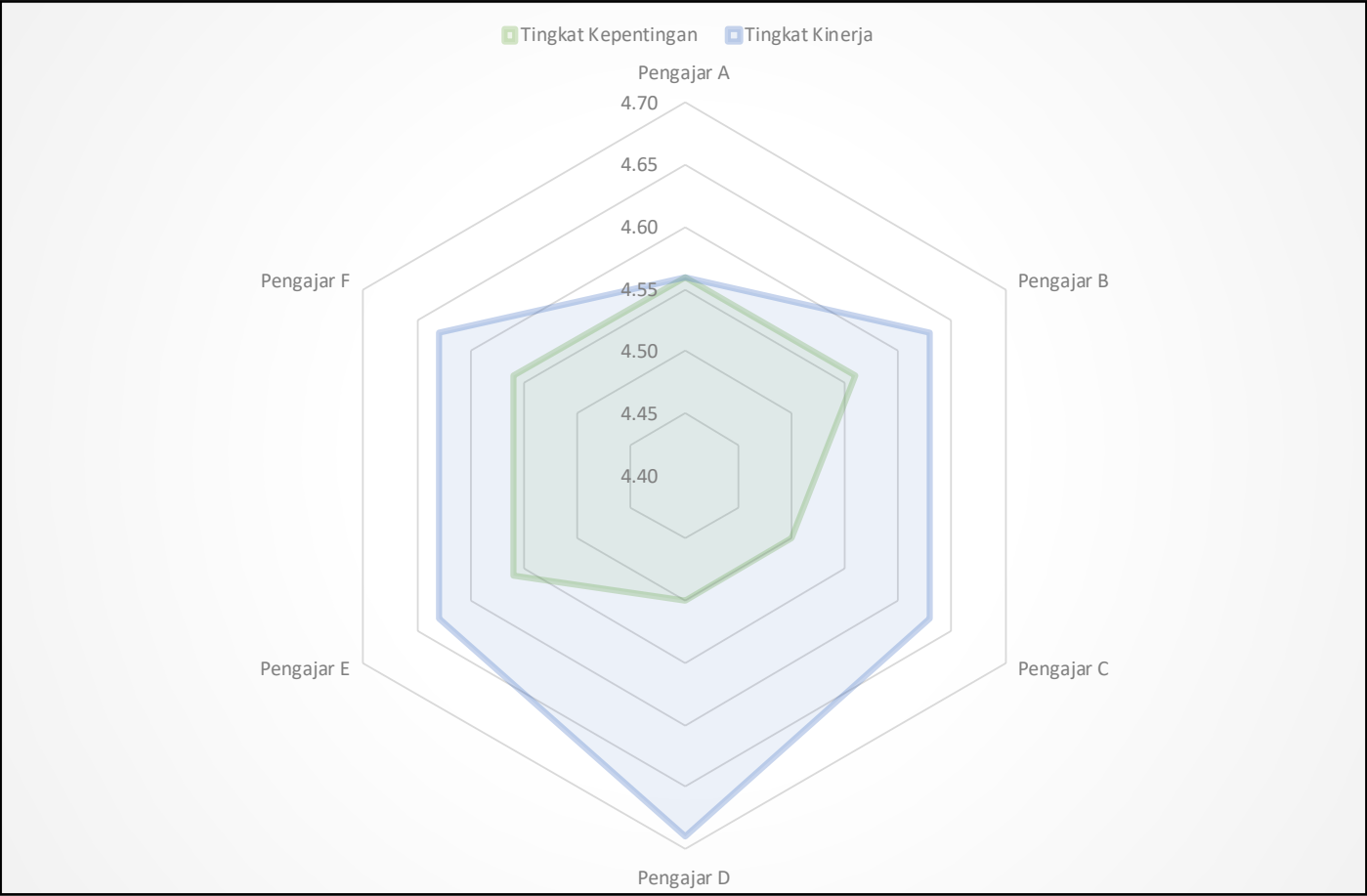
1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dituangkan dalam bentuk grafik radar dengan membandingkan tingkat kepentingan dengan tingkat kinerja dari nilai rata-rata yang diperoleh oleh para pengajar.

No	Aspek dan Nama Pengajar	Rerata Tingkat Kepentingan (I)	Rerata Tingkat Kinerja (P)	Gap (P – I)
A.	Pengetahuan Pengajar atas Materi yang Disampaikan			
1.	Pengajar A	4,56	4,56	-
2.	Pengajar B	4,56	4,63	0,07
3.	Pengajar C	4,50	4,63	0,13
4.	Pengajar D	4,50	4,69	0,19
5.	Pengajar E	4,56	4,63	0,07
6.	Pengajar F	4,56	4,63	0,07
	Total Rata-Rata	4,54	4,63	0,09
B.	Kemampuan Pengajar Menyampaikan Materi			
1.	Pengajar A	4,63	4,63	-
2.	Pengajar B	4,56	4,69	0,13
3.	Pengajar C	4,50	4,56	0,06
4.	Pengajar D	4,56	4,63	0,07
5.	Pengajar E	4,56	4,63	0,07
6.	Pengajar F	4,63	4,63	-
	Total Rata-Rata	4,57	4,63	0,05

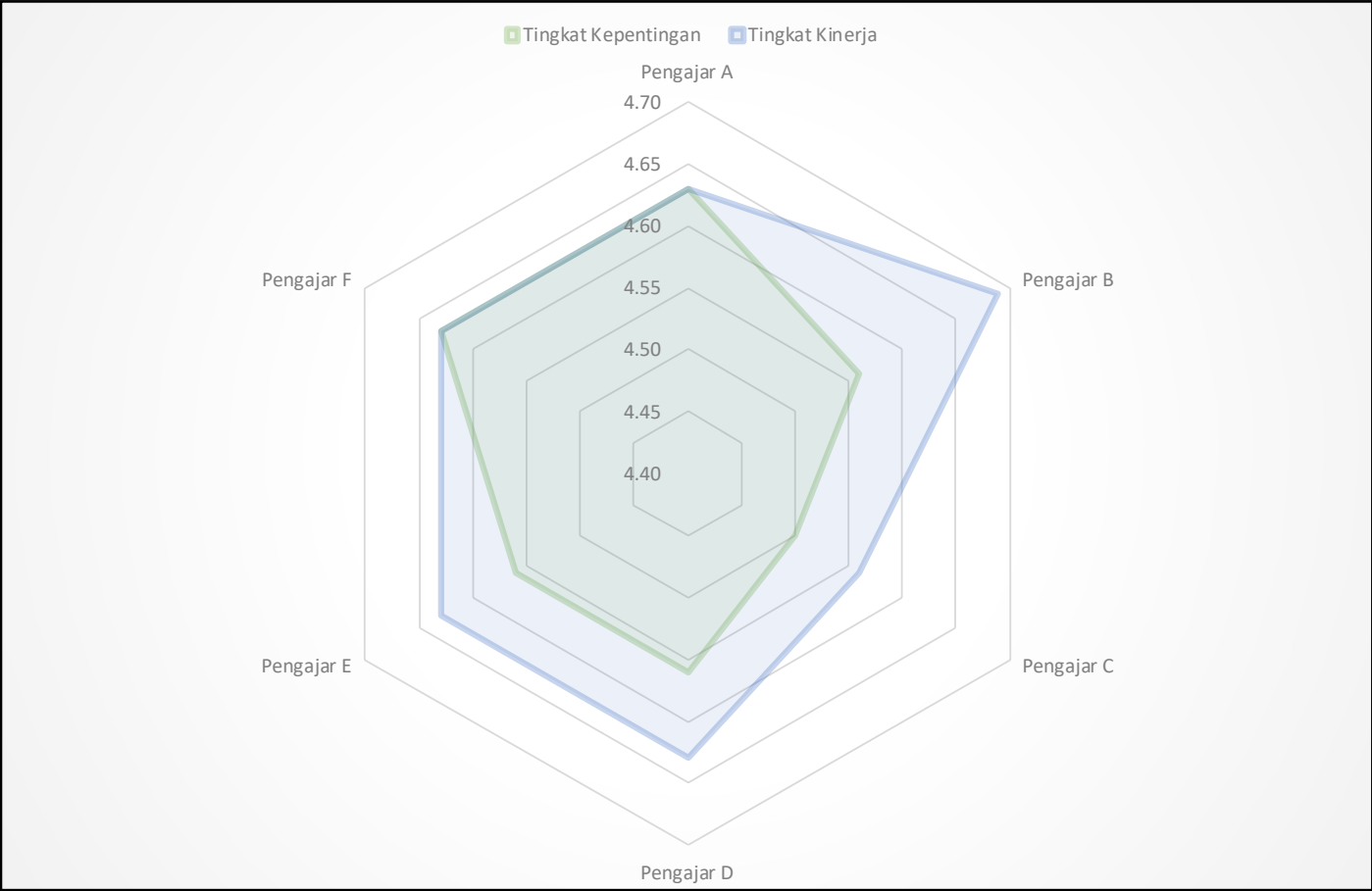
Tabel 2. Ringkasan Nilai Evaluasi Widyaiswara pada Pelatihan Tematis KPA Angkatan III

Hasil olah data pada aspek **pengetahuan pengajar atas materi yang disampaikan** hampir semua menunjukkan *gap* positif (+) antara **tingkat kepentingan** yang merupakan harapan yang **diinginkan** oleh peserta dengan **tingkat kinerja** yang merupakan pengalaman yang **dirasakan** oleh peserta selama mengikuti pembelajaran, kecuali pengajar atas nama **Pengajar A** yang memperoleh *gap* 0 (nol). Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir semua pengajar memiliki tingkat kinerja lebih tinggi dibandingkan tingkat kepentingan.



Gambar 1. Grafik Perbandingan Tingkat Kepentingan dengan Tingkat Kinerja pada Aspek Pengetahuan Pengajar atas Materi yang Disampaikan

Hasil olah data pada aspek **kemampuan pengajar menyampaikan materi** hampir semua menunjukkan *gap* positif (+) antara **tingkat kepentingan** yang merupakan harapan yang **diinginkan** oleh peserta dengan **tingkat kinerja** yang merupakan pengalaman yang **dirasakan** oleh peserta selama mengikuti pembelajaran, kecuali pengajar atas nama **Pengajar A** dan **Pengajar F** yang memperoleh *gap* 0 (nol). Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir semua pengajar memiliki tingkat kinerja lebih tinggi dibandingkan tingkat kepentingan.



Gambar 2. Grafik Perbandingan Tingkat Kepentingan dengan Tingkat Kinerja pada Aspek Kemampuan Pengajar Menyampaikan Materi

Secara keseluruhan, nilai rata-rata pada aspek **pengetahuan pengajar atas materi yang disampaikan** menunjukkan *gap* positif (+) sebesar 0,09, sedangkan nilai rata-rata pada aspek **kemampuan pengajar menyampaikan materi** menunjukkan *gap* positif (+) sebesar 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengajar memiliki tingkat kinerja lebih tinggi dibandingkan tingkat kepentingan.

2. Analisis menggunakan *Customer Satisfaction Index (CSI)*

Perhitungan CSI per individu maupun CSI gabungan ditunjukkan dengan penjumlahan dari nilai rata-rata kolom kepentingan (I) dan jumlah pengkalian antara I dan P pada kolom Skor (S) yang dijumlahkan sehingga diperoleh Total (T). IKM diperoleh dari perhitungan $(T/5Y) \times 100 \%$. Nilai 5 pada (5Y) adalah hasil nilai maksimum yang digunakan pada skala pengukuran.

CSI dihitung dengan rumus $(T/5Y) \times 100 \%$. Dengan CSI = *Customer Satisfaction Index*, T = Hasil kali antara jumlah rata-rata kepentingan dengan rata-rata kepuasan ($\Sigma I \times P$) dan 5Y = 5 x jumlah rata-rata Kepentingan ($5 \times \Sigma I$).

ASPEK:	Importance	Performance	Skor	CSI*
PENGETAHUAN PENGAJAR ATAS MATERI YANG DISAMPAIKAN	(I)	(P)	(I x P)	
1 Pengajar A	4,560	4,560	20,794	91,20 Sangat Puas
2 Pengajar B	4,560	4,630	21,113	92,60 Sangat Puas
3 Pengajar C	4,500	4,630	20,835	92,60 Sangat Puas
4 Pengajar D	4,500	4,690	21,105	93,80 Sangat Puas
5 Pengajar E	4,560	4,630	21,113	92,60 Sangat Puas
6 Pengajar F	4,560	4,630	21,113	92,60 Sangat Puas
SKOR TOTAL	27,240 Y		126,072 T	
CSI** = (T/5Y) x 100%				92,56 Sangat Puas
*: individu **: gabungan				

Tabel 3. Indeks Kepuasan Peserta terhadap Aspek Pengetahuan Pengajar atas Materi yang Disampaikan

Hasil perhitungan CSI gabungan atas aspek **pengetahuan pengajar atas materi yang disampaikan** menunjukkan nilai **92,56** yang berarti secara keseluruhan peserta merasa **sangat puas** atas kinerja para pengajar. Hasil perhitungan CSI per individu menunjukkan angka terendah **91,20** (sangat puas) dan angka tertinggi **93,80** (sangat puas), yang berarti setiap pengajar memperoleh penilaian **sangat puas**.

ASPEK:	Importance	Performance	Skor	CSI*
KEMAMPUAN PENGAJAR MENYAMPAIKAN MATERI	(I)	(P)	(I x P)	
1 Pengajar A	4,630	4,630	21,437	92,60 Sangat Puas
2 Pengajar B	4,560	4,690	21,386	93,80 Sangat Puas
3 Pengajar C	4,500	4,560	20,520	91,20 Sangat Puas
4 Pengajar D	4,560	4,630	21,113	92,60 Sangat Puas
5 Pengajar E	4,560	4,630	21,113	92,60 Sangat Puas
6 Pengajar F	4,630	4,630	21,437	92,60 Sangat Puas
SKOR TOTAL	27,440 Y		127,006 T	
CSI** = (T/5Y) x 100%				92,57 Sangat Puas
*: individu **: gabungan				

Tabel 4. Indeks Kepuasan Peserta pada Aspek Kemampuan Pengajar Menyampaikan Materi

Hasil perhitungan CSI gabungan atas aspek **kemampuan pengajar menyampaikan materi** menunjukkan nilai **92,57** yang berarti secara keseluruhan peserta merasa **sangat puas** atas kinerja para pengajar. Hasil perhitungan CSI per individu menunjukkan angka terendah **91,20** (sangat puas) dan angka tertinggi **93,80** (sangat puas), yang berarti setiap pengajar memperoleh penilaian **sangat puas**.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan dan rekomendasi dari penelitian ini adalah:

Secara keseluruhan peserta pelatihan Tematis Kuasa Pengguna Anggaran Angkatan III Tahun Anggaran 2018 merasa sangat puas atas kinerja yang ditampilkan pengajar, baik pada aspek pengetahuan pengajar atas materi yang disampaikan maupun aspek kemampuan pengajar menyampaikan materi. Penilaian peserta terhadap kinerja kedua aspek ini untuk masing-masing pengajar juga menunjukkan sangat puas.

Aspek kemampuan pengajar menyampaikan materi memperoleh nilai indeks kepuasan lebih tinggi (92,57) daripada aspek pengetahuan pengajar atas materi yang disampaikan (92,56), hal ini menunjukkan aspek *how to deliver knowledge and skill* para pengajar sudah sangat baik dan memuaskan peserta pelatihan.

Metode CSI sangat mudah untuk diterapkan pada layanan-layanan pemerintah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Selain pengumpulan datanya mudah, pengolahan datanya juga sederhana. Dan lebih penting lagi, metode CSI telah diamanatkan oleh kementerian keuangan sebagai metode terpilih dalam mengukur kepuasan masyarakat, sehingga penggunaannya diharapkan dapat semakin luas di seluruh unit Kementerian Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Oemar, Hamalik, 2007. *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan: Pendekatan Terpadu*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Soebagio, Atmowirjo (1993), *Manajemen Training: Pedoman Praktis bagi Penyelenggara Training*, Balai Pustaka: Jakarta

Jurnal dan Konferensi

Detty, Regina dkk, 2008. Evaluasi Keefektifan Program Pelatihan “Know Your Customer & Money Loundering” di Bank X Bandung. *National Conference of Management Research*. Makasar. 27 November 2008

Karya Ilmiah

Rizka, Arief M, 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pelatihan Keterampilan Kerja pada Loka Latihan Kerja (LLK) Selong Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Alumni Pelatihan Tahun 2011)*. Tesis. Tidak Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta

Aminah, Siti (2008), *Hubungan Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru Kimia dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Kimia Siswa Kelas X Semester II MA Kartayuda Wado Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2007/2008*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Keputusan Menteri PAN dan RB nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan

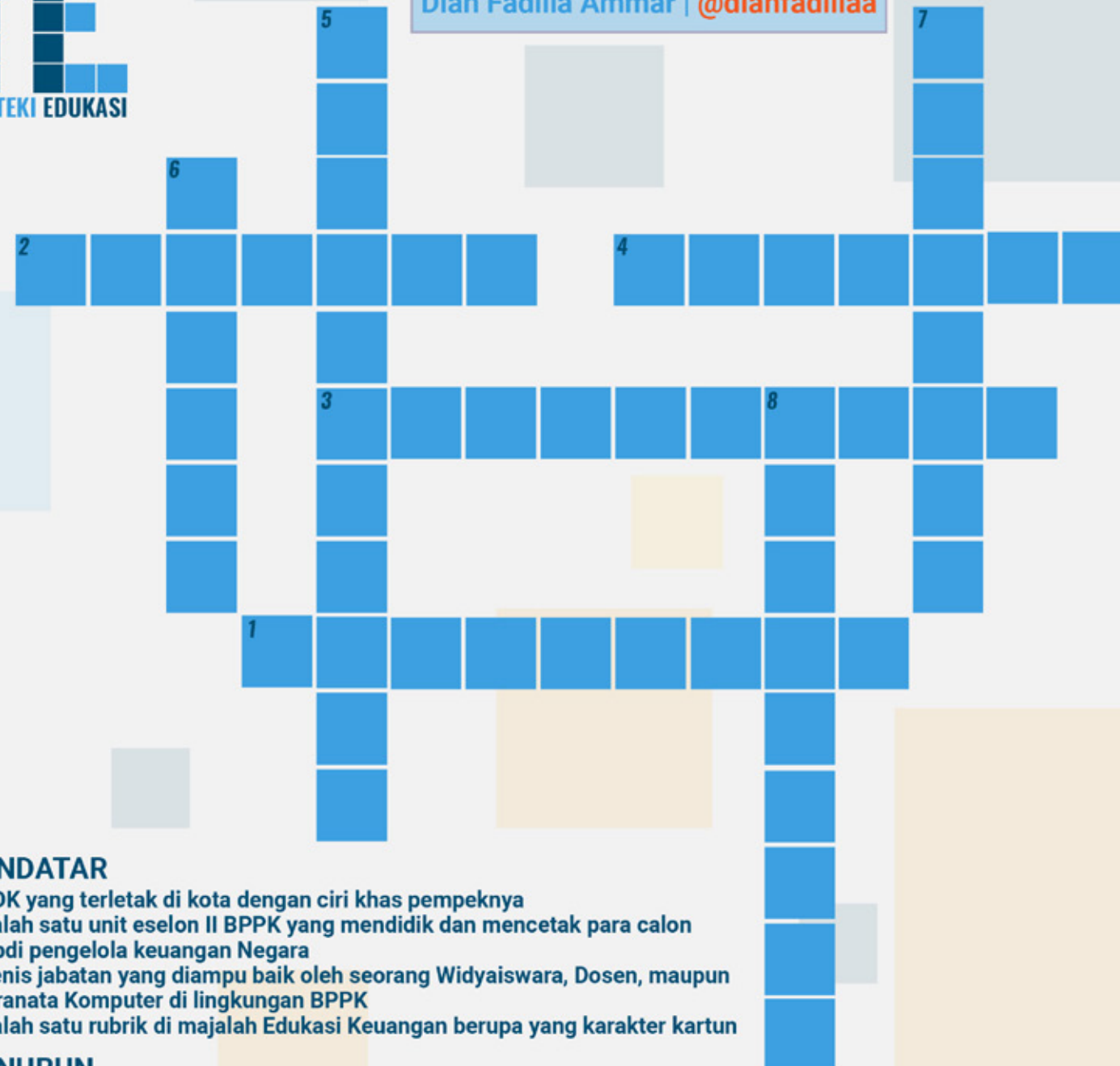
Nota Dinas Kepala Bidang Evalapkin Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan nomor ND-56/PP.33/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Pelatihan Tematis Kuasa Pengguna Anggaran Angkatan III Tahun Anggaran 2018

#BELAJARTANPABATAS

REALISASI CAPAIAN PROGRAM PEMBELAJARAN BPPK S.D. DESEMBER 2018



PEMENANG TEKI-TEKI EDUKASI EDISI 48
Dian Fadilla Ammar | @dianfadillaa



MENDATAR

1. BDK yang terletak di kota dengan ciri khas pempeknya
2. Salah satu unit eselon II BPPK yang mendidik dan mencetak para calon abdi pengelola keuangan Negara
3. Jenis jabatan yang diampu baik oleh seorang Widyaiswara, Dosen, maupun Pranata Komputer di lingkungan BPPK
4. Salah satu rubrik di majalah Edukasi Keuangan berupa yang karakter kartun

MENURUN

5. Serangkaian proses yang dilakukan oleh Tim Penguji Ahli mulai dari pelaksanaan pendaftaran ujian, pelaksanaan ujian, sampai dengan penyerahan Sertifikat Ahli yang dikeluarkan oleh BPPK
6. KLC merupakan media pembelajaran yang membahas berbagai materi tentang pengelolaan keuangan negara yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kemenkeu dan masyarakat umum
7. Salah satu karakteristik pembelajaran Kemenkeu Corpu
8. Salah satu strategi Kemenkeu Corpu dalam rangka menciptakan pembelajaran 2 arah yang dapat diikuti oleh selain pegawai Kemenkeu

CARA BERPARTISIPASI:

- Follow akun Instagram BPPK: @bppkkemenkeu;
- Jawaban lengkap dikirim via email ke alamat: edukasikeuangan@kemenkeu.go.id;
- Anda hanya boleh mengirimkan jawaban satu kali dan tidak diperkenankan melakukan koreksi;
- Cantumkan nama, no. HP, akun Instagram, dan alamat lengkap Anda di badan email dengan subjek: Teka-Teki Edukasi 49;
- Ikuti ketentuan tambahan yang tercantum di post promosi majalah Edukasi Keuangan Edisi 49 di akun Instagram BPPK (@bppkkemenkeu);
- Pengumuman pemenang akan disampaikan di majalah Edukasi Keuangan Edisi 50 dan akun Instagram BPPK, dan;
- Pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari tim redaksi.

Banyak pencapaian dan kegagalan yang terlewati selama satu tahun kemarin. Dan semua itu kini sudah terbungkus rapi dalam suatu wadah yang bernama masa lalu. Di tengah ingar bingarnya malam pergantian tahun, pasti akan terselip doa dan harapan. “Lalu apa ya yang ingin saya lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di tahun 2019 nanti?”. Banyak sekali yang terus ingin diperbaiki, misalnya, “Saya ingin rajin berolahraga”, “Saya ingin membeli rumah baru”, “Saya ingin belajar lebih giat lagi”, “Saya ingin bangun lebih pagi”, “Saya ingin ini saya ingin itu”, dan masih banyak lagi keinginan dan cita-cita yang ingin diwujudkan bagi setiap orang. Biasanya harapan-harapan ini muncul ketika menyambut tahun baru dan akan menjadi

yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dihimpun dari beberapa sumber, berikut merupakan fakta tentang resolusi tahun baru :

- 1. Orang pertama pembuat resolusi

Tradisi ini dilakukan oleh orang-orang Babilonia Kuno. Mereka adalah kelompok pertama yang membuat resolusi di tahun baru. Namun alih-alih membuat daftar panjang mimpi atau harapan, “resolusi” mereka adalah melakukan perjanjian dengan para dewa agar membayar utang mereka dan mengembalikan semua benda yang telah mereka pinjam. Resolusi yang dilakukan tersebut sekaligus perayaan “tahun baru” mereka yang terjadi pada pertengahan Maret. Tepatnya, saat musim tanam.

ini bahwa di tahun sebelumnya manusia harus bisa berinstropeksi dengan segala sesuatu yang telah dilakukan sebagai evaluasi di tahun depan supaya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi.

- 3. Pertama kali “resolusi tahun baru” muncul sebagai ungkapan dalam koran Boston yang terbit pada 1 Januari tahun 1813. Artikel tersebut menuliskan bahwa ada banyak orang yang telah merasa melakukan kesalahan di sepanjang bulan Desember dan terbiasa membuat resolusi di tahun baru.

Ketika seseorang di awal tahun sudah merancang manis daftar resolusi yang telah tersusun rapi mulai dari hal yang

resolusi jadi menipis hanya 64 persen dan lewat dari enam bulan, hanya 46 persen.

- 2. Psikolog sosial, Amy Cuddy dari Harvard Business School menjelaskan, masalah utamanya sebenarnya cukup simpel. Resolusi yang ditetapkan tidak aplikatif dan hanya berupa niat, bukan benar-benar ingin mendapatkannya. Seseorang cenderung menetapkan target yang tidak rasional, dan ketika benar-benar tidak terwujud maka yang timbul adalah emosi negatif dan rendahnya motivasi untuk mencapainya. Menargetkan sesuatu yang kita tahu tidak akan bisa diwujudkan justru berdampak negatif terhadap pengembangan diri sendiri.

sukses dengan daftar resolusi mereka, namun setelah dievaluasi dengan seksama pada penghujung tahun, tercatat hanya 12% saja yang berhasil meraih tujuan impian mereka. Itu berarti hanya 360 dari 3.000 orang yang bisa tersenyum puas dan menepuk dada mereka dengan bangga.

Jika bicara resolusi, tentu saja tidak bisa melupakan begitu saja kejadian masa lalu. Artinya apapun yang sudah maupun belum sempat kita kerjakan, pasti akan menjadi pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga. Mengapa kita perlu evaluasi lagi? Karena segala bentuk kegagalan atau kesuksesan yang telah kita dapat akan menjadi cambuk dan memberikan motivasi di kehidupan mendatang.

RETYAN LAKSITA MUTIARY

FAKTA DI BALIK “RESOLUSI”



target tahun depan yang harus tercapai. Inilah yang disebut dengan resolusi.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa resolusi memiliki arti putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berupa tuntutan tentang suatu hal (KBBI 2005). Jika merujuk pada arti tersebut, resolusi merupakan hasil rapat yang biasanya berisi tuntutan. Namun, kata tersebut sekarang sudah mengalami perluasan makna. Makna resolusi bisa berarti keinginan atau harapan sungguh-sungguh yang harus terwujud oleh pribadi seseorang.

Namun tahukah Anda? Rupanya resolusi tahun baru ini merupakan tradisi lama

- 2. Tradisi Romawi Kuno mirip dengan resolusi modern

Pejabat tinggi Romawi membuat resolusi agar tetap setia kepada republiknya dan bersumpah di hadapan kaisar pada tanggal 1 Januari. Raja Julius Caesar mengumumkan bahwa Januari adalah bulan bagi Janus, seorang dewa berwajah dua yang dipercaya sebagai dewa segala pintu gerbang. Bulan pertama dalam kalender Masehi juga dipercaya memiliki simbol yang spesial. Orang Romawi percaya bahwa satu wajah Janus menghadap ke masa lalu dan satu wajah lainnya menghadap ke masa depan. Untuk menghormatinya, mereka melakukan pengorbanan kepada Tuhan dan berjanji akan berperilaku baik untuk tahun yang akan datang. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan seseorang di zaman sekarang

paling diprioritaskan sampai hal-hal yang paling kecil dan berharap semua daftar resolusi itu bisa terwujud semua, namun terkadang kenyataan berkata lain. Tak jarang yang justru terjadi adalah rencana yang tinggal rencana, dan tekad kuat seringkali luntur seiring berjalannya waktu.

Dan tahukah Anda? mengapa semangat seseorang menjalankan resolusi tahun baru pada umumnya hanya ada di awal tahun?

- 1. Kegigihan mewujudkan perbaikan di tahun baru cukup kuat pada minggu pertama setelah resolusi dibuat, yaitu 75 persen. Namun di minggu kedua persentase orang yang masih bersemangat berkurang jadi 71 persen. Satu bulan setelah membuat

- 3. Seorang psikolog dari University of Washington, Elizabeth Miller, memperhatikan bahwa orang terbiasa merancang beberapa resolusi sekaligus, sehingga menjadi sebuah daftar. Sekitar 67% dari responden surveinya membuat resolusi sebanyak tiga buah atau lebih. Permasalahannya adalah hal itulah yang justru membuat seseorang sulit untuk mewujudkan rencana awal tahun mereka.

Penelitian lainnya, Richard Wiseman, seorang profesor di University of Hertfordshire, mengumpulkan data resolusi awal tahun lebih dari 3.000 orang. Pada awal tahun, sekitar 52% dari partisipan benar-benar yakin akan merasa

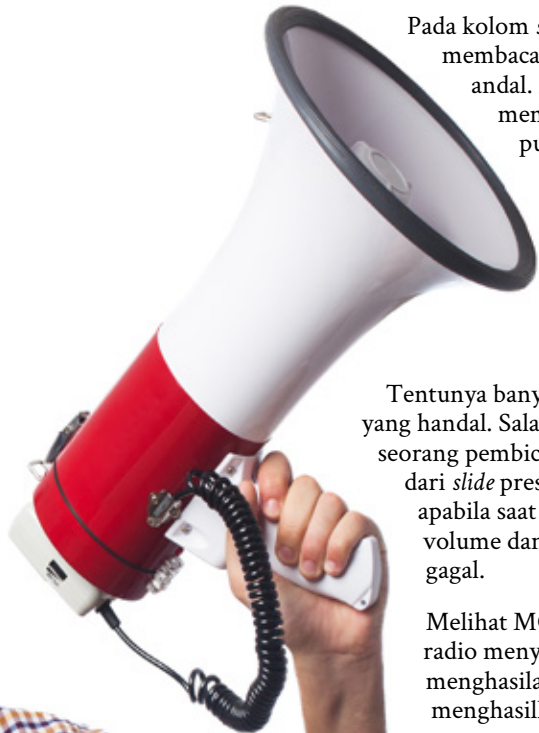
Selamat tahun baru 2019! Semoga pencapaian-pencapaian yang belum terealisasi di tahun-tahun sebelumnya akan segera terwujud di tahun 2019.

(Diolah dari berbagai sumber)

SUARA PEMBICARA & JURUS MENDAPATKANNYA

DODI SEPTARIZA

FOTO : FREEPIK.COM



Pada kolom *softskill* majalah edukasi keuangan edisi 48 sebelumnya, kita telah membaca bagaimana sepak terjang Socrates sebagai seorang pembicara yang andal. Apa yang kita lihat pada diri Socrates ribuan tahun lalu, justru makin mempertegas kebutuhan kita saat ini dalam hal berkomunikasi di depan publik.

Public speaking merupakan sebuah kompetensi yang wajib dimiliki semua orang saat ini. Tidak hanya bagi pembawa acara, penyiar radio, pembaca berita, politisi, artis, pejabat, atau profesi lain yang menuntut kemampuan berbicara didepan khalayak, pekerja biasa atau bahkan ibu rumah tangga sekalipun kini dituntut untuk bisa berbicara di depan umum.

Tentunya banyak sekali faktor yang menentukan seseorang bisa menjadi pembicara yang handal. Salah satu faktor tersebut adalah suara. Suara adalah senjata utama dari seorang pembicara, karena ketika semua hal sudah dipersiapkan dengan matang, mulai dari *slide* presentasi, *script* pidato, sampai dengan kostum yang dikenakan. Namun, apabila saat berbicara semua disampaikan dengan suara yang tidak jelas, atau dengan volume dan intonasi yang tidak tepat, seketika anda akan menjadi pembicara yang gagal.

Melihat MC membawakan acara, *news anchor* membacakan berita atau penyiar radio menyapa para pendengarnya adalah contoh sempurna bagaimana seseorang menghasilkan suara yang baik. Teknik pernapasan mempunyai pengaruh dalam menghasilkan suara, sehingga sering kali suara dibedakan berdasarkan jenis pernapasan yang digunakan untuk menghasilkan suara tersebut. Terdapat 3 jenis pernapasan yaitu pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan diafragma.

Pernapasan diafragma merupakan pernapasan yang paling disarankan untuk digunakan bagi para pembicara dan merupakan teknik yang jamak digunakan para pembicara profesional. Suara diafragma adalah suara yang terbentuk dari diafragma yang merupakan lapisan otot yang memisahkan rongga dada, tempat jantung dan paru-paru berada, bersama dengan organ dalam tubuh.

Keuntungan menggunakan teknik pernapasan diafragma adalah ketika berbicara menggunakan teknik ini kita dapat menghasilkan suara yang lebih bertenaga, bulat dan terdengar jelas, keras tanpa harus berteriak, mampu mengatur stamina dan memperjelas intonasi serta aksentuasi.

Cara mudah untuk bernapas melalui diafragma adalah dengan menarik napas sedalam mungkin sambil mendorong perut keluar sejauh mungkin dalam posisi tubuh yang stabil, kemudian berbicara sambil mengeluarkan napas dan tarik perut kembali. Pastikan pundak anda tidak ikut bergerak ketika berbicara.

Bagi orang yang jarang menggunakan pernapasan diafragma, mungkin terasa agak sulit berbicara dengan teknik tersebut, namun seperti peribahasa “alah bisa karena biasa” sesuatu yang sukar ataupun asing kita lakukan, namun ketika kita disiplin dan teratur menggunakannya, lama kelamaan hal tersebut akan terbiasa dan mudah digunakan.

Untuk membiasakan diri menghasilkan suara difragma, kita bisa menggunakan cara yang sering dilakukan para prfoesional seperti MC, penyiar radio, atau penyanyi, yaitu senam pernapasan. Senam pernapasan adalah gerakan untuk melatih seluruh perangkat bicara termasuk bagian lain yang terkait dalam fungsi penggunaan perangkat bicara. Dengan senam pernapasan yang dilatih dengan baik, akan membantu kita menghasilkan suara diafragma. Senam pernapasan ini juga biasa dilakukan para profesional sebagai pemanasan sebelum memulai berbicara di depan umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pembicara untuk datang paling lambat 60 menit sebelum acara dimulai, untuk

melakukan persiapan termasuk senam pernapasan.

Berikut adalah 11 jurus gerakan senam pernapasan yang bisa anda praktikkan sendiri sebelum memulai berbicara:

1. LION FACE (muka singa)

Kegunaan: Melemaskan otot-otot muka.

Gerakan:

- Muka diciutkan bersamaan dengan menguncupkan jari-jari kedua tangan;

- Muka dilebarkan dengan menjulurkan lidah sejauh mungkin.

2. MENGATUPKAN GIGI

Kegunaan: Melemaskan otot rahang.

Gerakan:

- Gigi dikatupkan dengan kuat, sementara bibir terbuka;

- Bersamaan dengan itu kedua tangan dikepalkan.

3. MELIPAT LIDAH KE ATAS & KE BAWAH

Kegunaan: Melatih dan melemaskan lidah.

Gerakan:

- Lidah dilipat keatas menyentuh langit-langit, sambil menekan barisan gigi bagian atas;

- Lidah dilipat kebawah dan menekan barisan gigi bawah;

- Gerakan dilakukan bergantian, masing-masing selama 10 hitungan (2 set)

4. LIDAH MENYAPU BIBIR

Kegunaan: Melatih pernafasan dan melemaskan bibir

Gerakan:

Lidah dilipat kebawah di luar bibir. Gerakan melingkar dari bibir bawah ke atas.

5. MENGGETARKAN BIBIR YANG MENGELUARKAN SUARA SEPERTI MOTORBOAT

Kegunaan: Melatih pernafasan dan melemaskan bibir.

Gerakan:

Tarik nafas dalam-dalam, kemudian nafas dikeluarkan pelan-pelan melalui bibir, sehingga bibir bergetar dan berbunyi seperti mesin *motorboat*

6. LATIHAN LEHER

Kegunaan: Memperkuat otot-otot leher dan bahu.

Gerakan:

Berdiri dengan kaki direntangkan terbuka, satu tangan di pinggang. Kemudian leher digerakkan ke kanan dan ke kiri.

7. URUT RAHANG

Kegunaan: Melemaskan otot muka.

Gerakan:

Jari-jari mengurut pipi dari muka ke belakang dan di saat yang sama rahang bawah digerakkan berputar menyamping.

8. PIJAT KERONGKONGAN

Kegunaan: Melemaskan kerongkongan dan pita suara.

Gerakan:

Tarik nafas, dan keluaran perlahan-lahan sambil mengucapkan huruf A. Sementara itu jari-jari memijit leher/kerongkongan dengan gerakan ke atas dan ke bawah.

9. MEMUTAR BAHU

Kegunaan: Memperkuat bahu sehingga mampu menahan rasa lelah karena duduk dalam waktu lama.

Gerakan:

Memutar sendi bahu ke belakang, sementara kedua lengan tegak lurus ke bawah.

10. NAFAS PANJANG

Kegunaan: Memperkuat nafas.

Gerakan:

- Menarik nafas dengan kepala mendongak;

- Kemudian nafas dikeluarkan perlahan sampai habis;

- Lalu badan dibungkukkan sambil tangan menekan perut, maksudnya menghabiskan nafas yang masih tersisa.

11. PIF PAF

Kegunaan: Memperkuat otot-otot diafragma dan pernafasan.

Gerakan:

Tangan berkacak pinggang, lakukan gerakan menekan perut ke dalam sambil mengeluarkan nafas secara cepat dengan melafalkan kata “pif paf pif paf” secara berulang. Pastikan bahu tidak bergerak.

(Diolah dari berbagai sumber)

HIDAYAT
ALUMNI ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM

WHAT AM I REALLY LOOKING FOR?



Ada satu tokoh pahlawan Indonesia yang menurut saya betul-betul paket komplit keteladanan. Religius, berintegritas, cerdas, sekaligus sederhana. Level perjuangannya pun tidak main-main hingga menusuk langsung ke jantung asal penjajahan. Pledoi pembelaannya yang tegas berjudul “*Indonesia Vrij*” dibacakan di pengadilan Den Haag, Belanda. Ya, beliau adalah Dr. Mohammad Hatta, sang Proklamator republik ini. Kesenangan membaca kisah hidup beliau sedikit banyak memberi sugesti dalam alam bawah sadar saya bahwa berkuliah di negeri orang sangat mungkin dilakukan sepelik apapun keadaan yang kita hadapi. Dari situ, ide untuk berburu beasiswa mulai berjangkit di pikiran saya.

Saya masih ingat momen ketika Pusdiklat PSDM mengumumkan nama saya dalam daftar pegawai yang lulus seleksi beasiswa SPIRIT *batch* VII. Sebuah kesempatan dan anugerah yang jujur saja pada waktu itu saya sudah skeptis akan mendapatkannya. Sebelumnya, sudah lima kali saya mengalami kegagalan seleksi beasiswa sehingga ketika mengirimkan berkas pendaftaran seleksi beasiswa tahun 2015 itu, saya sudah *nothing to lose*, tidak terlalu berharap banyak. *Toh*, seperti kata orang bijak, “rezeki telah tertakar dan jodoh tidak akan tertukar”. Pada kenyataannya, memasang ekspektasi yang rendah ternyata sangat berfaedah. Saya menjadi tidak terlalu *stress* dalam mempersiapkan dan menjalani rangkaian seleksi beasiswa saat itu. Hal berkebalikan justru terjadi pada seleksi-seleksi sebelumnya.

Setelah melewati masa *predeparture training* dan proses pendaftaran ke kampus tujuan, berangkatlah saya pada pekan terakhir bulan Agustus 2016 ke benua Eropa. Hari-hari pertama saya berada di benua biru ini justru banyak diisi dengan perenungan, lebih tepatnya lamunan. Pemandangan padang rumput pinggir kota ditambah suasana senja musim panas pukul 22.00 menjadi stimulus yang pas bagi neuron di otak untuk menyodorkan pertanyaan “*So, what am I really looking for?*” Pertanyaan ini

muncul karena saya sadar bahwa kuliah di luar negeri bukanlah akhir sebuah capaian. Perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Selain itu, saat itu saya diliputi perasaan masygul karena saya harus meninggalkan istri yang sedang mengandung anak kedua dan kami harus terpisah ribuan kilometer. Namun, pertanyaan di atas justru membuat *mindset* saya menjadi lebih jelas dan sederhana. Saya harus fokus dan menyelesaikan kuliah secepat mungkin. Sesuatu yang saya pikir adalah hal aneh untuk sebagian besar pemburu beasiswa. Walhasil, saya memilih menghindari dari rayuan *Euro Trip* ketika liburan musim dingin karena saya ikut-ikutan orang Belanda berlibur ke negara tropis seperti Indonesia.

Dan ternyata benar, kuliah di luar negeri sungguh menantang. Pendidikan jenjang master di negara Uni Eropa secara umum berlangsung selama satu tahun. Dengan demikian, mahasiswa master termasuk mahasiswa internasional sudah dianggap telah menguasai seluruh materi perkuliahan jenjang sebelumnya dan siap mempelajari sesuatu yang lebih *advance*. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi saya dan sebagian besar karyasiswa Indonesia karena kami relatif telah lama meninggalkan bangku kuliah. Bertemu kembali dengan beragam jenis regresi setelah sekian tahun berkutat dengan berbagai macam disposisi, pastinya memaksa otak untuk berpikir lebih keras.

Selain itu, perkuliahan di sana juga menerapkan sistem blok yang setara setengah semester di Indonesia dan mata kuliah harus diselesaikan dalam waktu tujuh minggu. Dengan demikian, waktu perkuliahan sangat padat dan proses belajar sifatnya sangat fokus. Tentu saja, cara belajar SKS (Sistem Kredit Semalam) menjelang ujian jelas bukan pilihan yang bijak. Lalu bagaimana menyiasatinya? Saya cukup beruntung karena mahasiswa Indonesia yang satu angkatan jumlahnya cukup banyak. Kegiatan mengulang pelajaran dan diskusi materi perkuliahan



rutin kami lakukan di sela-sela obrolan ringan khas anak nongkrong. Cara ini cukup efektif mengingat belajar seorang diri untuk persiapan ujian satu mata kuliah dengan materi 12 jurnal akademik yang masing-masing terdiri dari 25 halaman rasanya bukan pilihan yang bijak untuk kesehatan mata dan urat syaraf.

Meskipun sangat menantang, cara belajar yang ada menurut saya sangat membantu kerangka berpikir riset mahasiswa. Dalam satu tugas mata kuliah seminar, secara berkelompok kami disodori penugasan *playing role* sebagai lembaga *think tank* yang harus memberi pandangan atas kondisi pasar yang dikuasai perusahaan besar. Kembali pada premis awal bahwa mahasiswa dianggap sudah memahami metode penelitian, sang dosen hanya menyodorkan dua pertanyaan ringkas. Namun demikian, untuk menjawabnya kami secara mandiri harus menentukan desain penelitian yang tepat, membaca puluhan *paper* yang relevan, mengunduh dan mengolah data bisnis aktual, serta menyajikan hasil analisis dalam laporan yang padat (*compact*). Praktis, kami telah melakukan penelitian setara tugas akhir untuk kebutuhan satu tugas mata kuliah di kelas. Setelah proses ini, saya akhirnya menjadi tertarik pada rentetan rumus matematik dalam riset kuantitatif setelah belasan tahun hal ini sukses menjadi momok paling menakutkan bagi saya. Pengalaman ini juga menyadarkan saya bahwa cara belajar efektif adalah cara belajar yang betul-betul menjadikan kita sebagai subjek.

Akhirnya, saat ini saya sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk mengenyam pendidikan di luar negeri. Menjalani proses pendidikan dengan sistem belajar mandiri yang sangat efisien namun efektif merupakan pelajaran penting yang dapat saya simpulkan dari masa tugas belajar saya. Selain itu, saya banyak belajar dari kehidupan sosial yang ada di sana. Bagaimana pejalan kaki sangat diutamakan di jalan raya, budaya bersepeda yang tidak hanya mengurangi polusi tapi juga menyehatkan, serta komitmen atas kualitas yang sangat kuat. Oh iya, saya belum menyebutkan bahwa saya mengambil kuliah *MSc Accounting, Auditing, and Control* pada Erasmus Universiteit Rotterdam. Dahulunya kampus ini bernama Handels-Hogeschool Rotterdam. Saya yakin bukan hanya kebetulan semata ketika mengetahui bahwa kampus ini adalah kampus tempat Bung Hatta dahulu bersekolah.

RIDWAN SIDIK KURNIAWAN

Tips Membuat Video Berkualitas dengan Smartphone

Di era digital saat ini, video tidak hanya menjadi sarana hiburan semata. Mencari video tutorial merupakan hal yang lazim dilakukan. Artinya, saat ini telah banyak *content creator* yang membagi ilmu dan pengetahuannya dengan cara membuat video dan mengunggahnya ke internet. Pengetahuan yang dibagikan pun bermacam-macam, mulai dari pengetahuan ringan seperti tutorial menambal ban sepeda sendiri, sampai pengetahuan yang lebih mendalam seperti video pembelajaran yang membahas tentang keuangan negara.

Menjamurnya *content creator* tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang memudahkan kita untuk membuat video. Tidak seperti dahulu yang memerlukan alat perekam khusus, saat ini kita bisa merekam video hanya

dengan menggunakan *smartphone* yang kita miliki. Meskipun hasilnya mungkin masih kalah dengan alat perekam profesional, bukan berarti kita tidak bisa membuat video berkualitas hanya dengan *smartphone*. Apalagi saat ini produsen *smartphone* berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas kamera yang disematkan pada produk mereka. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kualitas video yang tidak sekedar asal jadi dan berkualitas rendah. Berikut kami sampaikan beberapa tips untuk memaksimalkan kualitas video yang dibuat dengan *smartphone*.

PILIH RESOLUSI MAKSIMAL

Setiap *smartphone* memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, termasuk dalam hal spesifikasi kamera yang terpasang. Sebelum memulai perekaman, pastikan pengaturan video telah sesuai dengan yang dikehendaki. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah resolusi video. Resolusi yang sering digunakan saat ini adalah HD (720p), Full HD (1080p), dan 4K. Usahakan untuk memilih resolusi video paling tinggi yang tersedia dalam pilihan pengaturan resolusi video *smartphone* Anda. Kenapa? Karena akan lebih mudah meng-*convert* video dari resolusi tinggi ke rendah, sebaliknya video yang memiliki resolusi rendah akan pecah saat diubah ke resolusi yang lebih tinggi.

CEK BATERAI DAN KAPASITAS PENYIMPANAN

Hal mendasar tetapi sangat penting untuk dilakukan sebelum memulai perekaman adalah mengecek kapasitas penyimpanan dan baterai yang tersisa. Semakin besar resolusi video yang dipilih tentunya berbanding lurus dengan kualitas video yang dihasilkan. Namun di sisi lain, semakin besar resolusi video akan membuat ukuran video menjadi lebih besar sehingga membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih banyak. Selain itu, kamera membutuhkan daya besar pada saat merekam video sehingga baterai akan lebih cepat habis.

Maka tidak ada salahnya kita mengecek terlebih dahulu kapasitas baterai dan *storage smartphone* kita. Kita tidak ingin *kan* kehilangan momen hanya karena kehabisan baterai atau *storage* kita sudah penuh?

GUNAKAN TRIPOD, BUKAN TRISEP UNTUK VIDEO YANG STABIL

Saat mengambil video, seringkali dengan alasan kepraktisan kita memegang alat perekam (*smartphone*) hanya dengan salah satu/kedua tangan. Akibatnya, video yang diambil menjadi kurang stabil (*shaky*), terutama jika video direkam dalam jangka waktu yang cukup lama. Tangan dan

lengan kita semakin lama akan semakin letih untuk mempertahankan kedudukan *smartphone* yang dipegang sehingga akan menimbulkan getaran-getaran dan menyebabkan *smartphone* bergoyang. Video yang tidak stabil tersebut tentunya menjadi kurang nyaman untuk ditonton. Oleh karena itu, sebisa mungkin gunakanlah bantuan tripod jika ingin mendapatkan video dengan gambar yang stabil.

GUNAKAN STABILIZER

Tripod memang bisa menjadi solusi pada saat kita merekam objek yang relatif tidak berpindah posisi, yang menyebabkan kita harus menggerakkan *smartphone* untuk menjaga objek yang kita rekam tetap berada di dalam *frame*. Namun terkadang ada keadaan dimana kita harus merekam objek yang bergerak atau berpindah tempat, misalnya saat mengambil video mengikuti orang yang sedang berjalan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan bantuan alat tambahan yakni *stabilizer* atau sering disebut juga gimbal. *Stabilizer* ini membantu kita untuk meminimalisir guncangan pada saat menggerakkan *smartphone*, dengan ‘mengubah’ guncangan tersebut menjadi sebuah gerakan yang *smooth* sehingga video menjadi lebih enak untuk dilihat.

PERHATIKAN KUALITAS SUARA

Terkadang saat merekam video, kita terlalu fokus memperhatikan kualitas gambar dan kurang memperhatikan kualitas suara. Padahal, dalam sebuah video, suara juga menjadi unsur penting yang harus diperhatikan. Bahkan pada banyak kasus, orang lebih tahan menonton video dengan kualitas gambar yang kurang bagus tetapi memiliki kualitas suara yang cukup baik, dibandingkan menonton video yang memiliki gambar bagus tetapi kualitas suaranya kurang nyaman untuk didengar. Kualitas suara dalam sebuah video akan menjadi lebih penting lagi jika ternyata video yang kita buat berisi monolog atau percakapan, yang menyebabkan video

tersebut kehilangan intinya saat suara dihilangkan. Oleh karena itu, pastikan suara dapat terekam dengan baik. Jika perlu, gunakan aksesoris atau perangkat tambahan seperti *microphone eksternal* atau *clip on* untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik.

REKAM VIDEO DENGAN POSISI HORIZONTAL

Ada dua alternatif posisi yang bisa dipilih saat kita melakukan perekaman dengan *smartphone*, yakni posisi vertikal (*portrait*) dan horizontal (*landscape*). Sebenarnya posisi mana yang lebih baik itu relatif dan ditentukan dari media yang kita gunakan untuk melihat video tersebut nantinya. Memang jika dilihat langsung dari *smartphone*, kedua posisi tersebut sama-sama nyaman untuk dilihat. Namun jika kita melihat video dari media lainnya yang memiliki layar horizontal, tentu video *landscape* lebih nyaman dilihat daripada video *portrait*. Saat ini media yang layarnya berorientasi horizontal masih lebih umum ditemui, contohnya adalah televisi, layar laptop, bahkan bioskop. Oleh karena itu, akan lebih aman jika video kita ambil secara horizontal.

GUNAKAN EDITOR

Ibarat sebuah makanan, video yang kita rekam melalui *smartphone* adalah sebuah bahan makanan yang masih mentah. Memang sudah bisa dimakan, tetapi akan jauh lebih menggoda selera jika bahan-bahan makanan yang masih mentah tersebut kita masak terlebih dahulu sehingga akan menjadi sebuah makanan yang lebih lezat. Demikian juga dengan video. Kita bisa saja mempublikasikan langsung video yang sudah selesai kita rekam tanpa melalui proses *editing*. Padahal akan jauh lebih menarik jika video tersebut diolah terlebih dahulu sebelum kita publikasikan. Melalui proses *editing*, kita bisa menghapus *scene* yang tidak diperlukan, menyatukan video, memberi efek tertentu, menambahkan teks, *sound effect*, *background music*, dan masih banyak lagi.

Tenang saja, kita tidak harus mengedit video melalui PC atau laptop. Kita bisa mengedit video secara langsung menggunakan *smartphone* karena saat ini telah banyak aplikasi video *editor* untuk *smartphone* yang bisa kita unduh, baik yang gratis maupun berbayar.

HINDARI ZOOM DIGITAL

Hampir semua *smartphone* memiliki fitur *zoom* digital pada kameranya. Namun sebisa mungkin, jangan terlalu mengandalkan fitur ini. Pasalnya, kebanyakan *smartphone* sebenarnya hanya melakukan *cropping* di video kita. Akibatnya sudah bisa ditebak, semakin besar *zoom* yang dipakai maka kualitas gambar video akan semakin pecah atau menurun. Daripada menggunakan *zoom*, lebih baik dekatkan kamera (*smartphone*) ke objek. Ini akan membuat kualitas video menjadi lebih terjaga ketimbang menggunakan zoom digital.

PERHATIKAN CAHAYA

Kamera *smartphone* biasanya memiliki kemampuan yang lebih terbatas dibandingkan alat perekam video yang lebih profesional seperti DSLR, atau kamera profesional. Oleh karena itu, kita harus memberi perhatian lebih pada ketersediaan cahaya. Perhatikan arah dan sumber cahaya terhadap objek sehingga video yang dihasilkan tidak menampakkan objek yang gelap (*backlight*). Selain itu, sebisa mungkin rekamlah video pada kondisi cahaya yang cukup, karena video yang diambil dalam keadaan pencahayaan yang kurang (*lowlight*), terutama jika video diambil hanya menggunakan kamera *smartphone*, akan berpotensi menimbulkan *noise* pada gambar yang dihasilkan. *Noise* yang berupa titik-titik tersebut tentunya akan mengganggu karena menyebabkan kualitas gambar video menjadi kurang halus.

Demikianlah beberapa tips untuk lebih memaksimalkan pengambilan video yang diambil dengan *smartphone*. Semoga tips di atas dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Selamat mencoba.

ANDI NUR SYAMSUDDIN

TIPE PESERTA PELATIHAN VERSI BINTANG MANAKAH KAMU?

Melayani peserta pelatihan merupakan tugas pegawai BPPK. Dalam menjalani tugas pelayanan tentu saja akan menemui berbagai tipe peserta pelatihan. Agar dapat melayani dengan baik maka sangat penting bagi para pegawai, terutama mereka yang berhadapan langsung, untuk mengenali tipe peserta pelatihan. Beberapa sumber membagi tipe peserta pelatihan berdasarkan peran. Melalui pembagian tersebut kita mengenal istilah turis, nabi, dan pendaki gunung. Disebut turis bila si peserta bahagia karena dapat keluar sejenak dari jerat tugas kantornya lantaran ikut pelatihan. Disebut nabi bila si peserta sedih karena lokasi pelatihan yang jauh atau kerja kantor yang gagal tercapai karena diutus pelatihan. Terakhir, disebut pendaki bila si peserta bangga dan merasa tertantang lantaran akan melalui tebing yang sulit, namun terhampar panorama indah dari puncak kelak. Artinya, pascapelatihan si peserta dapat mempraktekkan ilmu untuk kinerja kantor yang lebih baik.

Eits, belum cukup sampai di sini. Karena ada juga tipe peserta pelatihan versi bintang. Yaitu versi dimana kita bisa menemukan mereka tatkala kita mendongak ke atap tanpa tiang bertajuk langit. Nah, berikut cuplikannya:

1. TIPE MATAHARI

Tipe ini paling dekat, paling jelas panasnya, paling besar tampilannya, dan tentunya paling terasa keberadaannya. Terbit dari timur dan tenggelam menuju barat, ia seolah menjadi dambaan bukan hanya bagi pengajar, namun juga peserta pelatihan lainnya. Hangat, dekat, solutif, riang, dan penuh kata-kata positif, baik di dalam maupun di luar kelas. Tak ayal bila kemudian ia didaulat menjadi ketua kelas lantaran sifat mengayominya ini. Namun, sebagaimana matahari bersifat terik di siang, ia juga bisa tegas memastikan kelas teratur, termasuk dalam menuntut dukungan dari panitia selama berlangsungnya pelatihan.

2. TIPE ALPHA CANIS MAJORIS

Mungkin tipe yang satu ini terdengar asing. Dengan nama latin: *Sirius*, dalam tradisi Arab ia disebut *Asy-Syi'ra* (dipuja-puja kaum penyembah berhala), lewat

bahasa Sansekerta ia melambangkan *Siwa*, sang dewa pelebur/penghancur. Difilm Harry Potter seri ke-3, ia bernama belakang “*Black*”, seorang buronan yang bisa berubah wujud menjadi anjing hitam besar, persis seperti nama konstelasinya, yakni *Canis Majoris*: rasi bintang anjing besar.

Sirius memiliki keistimewaan menjadi bintang paling terang di kala malam, dengan kata lain peringkat nomor 2 bintang paling terang setelah matahari. Sebagai peserta pelatihan, tipe ini akan mencoba berkuasa, perusuh, kurang disukai, terlalu dominan, hingga penuh trik kemenangan. Kedudukan *Sirius* sangat dominan hampir menyamai matahari, sang ketua kelas. Hanya saja lebih condong kepada sisi negatifnya.

3. TIPE KONSTELASI CRUX

Tipe berikutnya, *Crux* nama latinnya, salib selatan nama baratnya, gubug penceng nama kuno Indonesianya, layang-layang nama akrabnya. Ia merupakan rasi terkecil di langit malam, namun justru yang paling banyak dicari oleh pendaki gunung, musafir tersesat, hingga nelayan. Mengapa? Tak lain karena aksi dua bintangnya: *Alpha Crucis* dan *Gamma Crucis*. Bila ditarik ke horizon bumi, dua bintang ini selalu menunjuk arah selatan, kapanpun waktu malamnya: apakah awal, tengah, hingga akhir malam, tentu pada masa edarnya.

Kalau diibaratkan peserta pelatihan, yang berkarakter begini adalah mereka yang awalnya datang ke kelas dengan kesepian atau sendiri, tetapi dapat ber-*chemistry* dengan satu atau lebih peserta. Ia dapat bersinergi dengan peserta lain melalui kelompok atau penugasan kelas, sehingga soliditas mereka membawa manfaat bagi aktivitas kelas.

Kalau bisa dijabarkan tentang *Crux* ini, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan akan menghasilkan sahabat dekat, partner kelas, atau tim solid. Namun kalau berlainan jenis, maka ia berpotensi melenggang ke jenjang lebih lanjut alias “menyatu dalam jiwa”. Biasanya yang terakhir disebut berlaku di pelatihan-pelatihan berisi anak-anak baru. Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS misalnya.

4. TIPE ALPHA CYGNI

Kita coba jalan-jalan ke rasi *Cygnus* (angsa). Di sana ada sebuah bintang super-raksasa, berperingkat pertama terbesar, bertajuk *Alpha Cygni*. *Deneb* nama latinnya. Silaunya 60.000 kali matahari, dengan diameter 200 kalinya, akan tetapi dengan jarak yang superjauh 1800-an tahun cahaya dari bumi, ia hanya berperingkat ke-19 bintang paling terang di langit bumi, dimana peringkat pertamanya matahari, dan yang keduanya *Alpha Canis Majoris*.

Terkadang ditemukan peserta diklat yang diam selama di kelas, pasif, penganut aliran kebatinan, sulit bekerja sama (cahayanya bukan yang tercerah), namun tiba-tiba ketika evaluasi atau ujian pelatihan, nilainya paling tinggi atau meroket ke peringkat atas rata-rata. Di kelas, ia enggan dominan, namun di belakang ia punya potensi yang jauh melampaui teman sekelasnya. Ada yang seperti ini?

Itulah ke-4 tipe “bintang” peserta pelatihan. Sebagaimana bintang, tentu masih bertriliunan lagi jumlah mereka di luasnya semesta alam. Masih banyak jenis bintang lain yang membuka potensi tipe-tipe lainnya. Satu hal yang sama, bahwa mereka adalah bintang, makhluk Tuhan penebar cahaya di langit.

Selayaknya bintang, maka sepulang pelatihan, alumni peserta akan membagi cahaya-cahaya keilmuan dan kinerja optimal bagi unit kantornya. Mereka akan menciptakan kesetimbangan di kantor, membuat progres kinerja unit menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitulah sejatinya pelatihan yang ber-*impact* pada kinerja organisasi.

(Diramu dari berbagai sumber)

DR. ELZA NOVITA
RUMAH VAKSINASI SAWANGAN

TETAP BAHAGIA SAAT KEHAMILAN DAN PERSALINAN

Garis dua? Hasil *test pack* positif (+)? Hamil? Lalu apa yang muncul di benak Anda? Bahagia pastinya. Namun, seiring berjalannya waktu kebahagiaan itu luntur dan tergantikan dengan rasa panik, letih dan bayang-bayang kerepotan yang disebabkan kehamilan dan persalinan. Tapi tunggu dulu, kodrat kehamilan itu adalah kebahagiaan. Untuk itu, *yuk* kita lakukan 5 hal berikut agar tetap bahagia saat masa kehamilan dan persalinan.

BERSYUKUR

Bersyukur adalah kemampuan menghargai apa yang Anda dapat dan memandang positif apa yang terjadi, walaupun tidak selalu berkenan di hati. Jika Anda bersyukur, maka niscaya kebahagiaan akan selalu ada pada setiap kejadian yang Anda alami. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap dengan kehamilan Anda, kehamilan adalah anugerah yang wajib disyukuri. Kehamilan menandakan tubuh Anda dalam kondisi stabil dan mampu membesarkan calon anak.

Tentunya akan sangat mudah diterima jika kehamilan yang terjadi adalah harapan yang sangat dinantikan. Lain halnya jika kehamilan ini sesuatu yang di luar harapan. Namun tetap saja, hal tersebut juga wajib disyukuri, karena kehamilan adalah sebuah rezeki yang sudah digariskan. Perjalanan kehamilan dan proses persalinan yang dipenuhi rasa syukur akan mendatangkan keberkahan yang pada akhirnya berpengaruh pada kerja hormon tubuh Anda, dan berefek baik pada diri Anda serta proses tumbuh kembang janin di dalam rahim.

MELAKUKAN KONSULTASI DENGAN TENAGA AHLI DAN MENCARI BANYAK ILMU

Selama kehamilan tentu saja akan banyak terjadi penyesuaian fungsi tubuh. Penyesuaian ini mungkin saja akan dirasakan menjadi sesuatu hal yang tidak nyaman oleh ibu hamil. Walau sebetulnya hal ini terjadi hanya sebagai proses adaptasi tubuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, dan penyesuaian jaringan tubuh ibu yang nantinya akan terlibat pada saat proses melahirkan.

Sebaiknya segerakan saja untuk melakukan konsultasi kehamilan pada tenaga medis terbaik, serta ikuti kelas kehamilan atau mencari tahu berbagai ilmu kehamilan dari sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ilmu yang didapat, Anda bisa mempersiapkan segala kebutuhan Anda dan calon bayi dengan optimal mulai dari hari ke nol pembuahan.

Dalam kehamilan tidak ada kata pengulangan, dimana ledakan perkembangan dan pertumbuhan janin terjadi setiap harinya. Jika terjadi kekurangan dalam pertumbuhan janin di dalam kandungan tentunya tidak akan dapat dikejar setelah ia dilahirkan, karena pertumbuhan dalam kandungan berbeda dengan pertumbuhan anak setelah dilahirkan. Pilihlah tenaga medis atau nonmedis yang baik, yang dapat mendukung kesehatan kehamilan anda lahir dan batin. Jangan biarkan serangkaian mitos-mitos buruk dalam masyarakat mengganggu kesehatan kehamilan Anda. Ilmu yang baik tentang kehamilan dan persalinan dapat membuat Anda lebih tenang, paham dan

mampu menentukan pilihan apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus dihindari pada kehamilan dan persalinan nantinya, termasuk pada saat terjadi rasa ketidaknyamanan saat penyusuaian fungsi tubuh tadi.

OPTIMALKAN ASUPAN NUTRISI

Dalam kehamilan, asupan nutrisi yang baik amatlah penting. Hal ini bukan hanya bermanfaat untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan calon anak yang ada dalam kandungan, tetapi juga besar manfaatnya bagi calon ibu yang akan berjuang melahirkannya nanti.

Makan dengan baik adalah satu-satunya hal terbaik yang bisa Anda lakukan sekarang ini, dan hanya Anda yang mampu mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh Anda setiap harinya. Jangan lupa, bahwa tubuh Anda adalah yang menyediakan segala nutrisi dan bahan-bahan untuk kebutuhan janin, beserta jaringan penjaganya dalam rahim sampai bayi itu selamat dilahirkan. Bayi dalam kandungan mendapatkan sumber tenaganya langsung dari apa yang mengalir dalam darah ibunya. Semua yang ibu hirup, telan dan suntikkan akan mencapai plasenta untuk disalurkan kepada bayi hanya dalam waktu 60 detik. Menurut banyak penelitian, ibu hamil seharusnya mengkonsumsi protein lebih dari 75 gram dalam sehari, asupan air dan garam yang cukup, dan berbagai vitamin serta mineral. Makanlah makanan yang baik dengan berbagai variasi makanan dalam diet Anda. Hal ini sebagai cara terbaik untuk memastikan tubuh mendapatkan beraneka ragam nutrisi yang dibutuhkan.

TETAP AKTIF DAN BERAKTIVITAS

Dalam berbagai literatur tidak pernah ada yang mengatakan dalam kehamilan yang sehat, seorang ibu hamil harus membatasi aktivitasnya. Justru dengan beraktivitas, kesehatan ibu hamil akan semakin terjaga baik dan berguna untuk persiapan persalinan nantinya.

Dr. Robert A. Bradley, ahli kebidanan dari Amerika, pencetus *Bradley Method*, mengatakan bahwa selama proses persalinan dan melahirkan secara normal, ibu hamil akan mengeluarkan tenaga yang sama dengan aktivitas sebuah lari maraton atau berenang sejauh 1,6 km. Tenaga dan pengerahan otot yang dibutuhkan dalam melahirkan memerlukan kekuatan, ketetapan hati, fokus, dan juga stamina. Sebagian dari kita mungkin tidak menjalani hidup yang kondusif untuk aktivitas fisik seperti itu, namun berita baiknya adalah Anda memiliki waktu beberapa bulan untuk bisa mempersiapkan diri agar dapat berhasil melahirkan secara normal.

Gunakanlah waktu yang ada untuk mengolahragakan otot-otot dan memperbaiki kelenturan, tubuh Anda sehingga siap menghadapi persalinan nanti. Gerakan yang dibutuhkan pun sama sekali tidak sulit, Anda hanya butuh rutin meluangkan waktu 15 menit sehari untuk berjalan, berenang, berjongkok serta latihan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam persalinan. Karena atas dasar apapun, melahirkan dengan cara normal adalah yang terbaik dan penuh manfaat untuk Anda dan sang bayi. Maka mulailah melakukan gerakan-gerakan tersebut sedini mungkin.

KONTROL NAIK TURUNNYA PERASAAN

Kehamilan adalah masa yang penuh dengan gabungan dan perubahan emosi. Suasana hati atau *mood* gembira bercampur dengan cemas, yang kemudian berubah menjadi ketakutan adalah suatu hal yang lumrah. Namun yang harus Anda ketahui, emosi adalah perasaan kuat yang ternyata dapat mempengaruhi aliran hormon. Sedangkan hormon

itu sendiri adalah bahan-bahan kimia alami yang dikeluarkan tubuh dan mempengaruhi perubahan fungsi tubuh. Maka dari itu, penting untuk ibu hamil dapat mengontrol emosinya.

Ada banyak cara yang bisa anda lakukan untuk mengontrol emosi, yang paling besar pengaruhnya adalah dukungan dari orang terdekat terutama pasangan anda. Rasa cinta, perhatian khusus dan kepedulian dari pasangan merupakan obat paling mujarab untuk meredakan ketegangan yang dialami seorang ibu hamil. Maka dari itu, sering-seringlah menghabiskan waktu bersama dengan pasangan Anda, berkeluhkesahlah di pundak suami anda dan rasakan kehangatan kasih sayang sang calon bapak dari bayi di dalam kandungan Anda. Gunakan momen kebersamaan tersebut untuk mengutarakan apa yang anda mau dan butuhkan, sembari mendiskusikan rencana-rencana yang akan Anda pilih dalam proses persalinan nanti. Pastikan pasangan dan tim medis yang nantinya terlibat dalam persalinan Anda paham dan mendukung pilihan yang anda putuskan.

Selain itu, guna mengurangi ketegangan selama perjalanan kehamilan atau saat persalinan, relaksasi terbukti dapat bekerja dengan baik. Sebaiknya Anda mulai mempelajari teknik relaksasi. Berlatihlah bersama pasangan Anda sesering mungkin sehingga anda dapat merasakan relaksasi yang mendalam sehingga dapat memberikan kenyamanan.

Lebih dari itu semua, setelah semua hal telah kita persiapkan, berdoa dan berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah hal yang paling utama. Karena hanya dengan izin-Nya kehamilan dan persalinan akan dipenuhi dengan kebahagiaan.

DAVID SULISTYANTO RAHMAT

PESONA MINAHASA DARI PANTAI HINGGA TARIAN PERANG

Sulawesi Utara memiliki sederetan daya tarik wisata baik bagi turis domestik maupun mancanegara. Salah satunya Bunaken, yang menjadi ikon provinsi beribu kota Manado ini. Namun, Sulawesi Utara tak sebatas Bunaken atau Danau Linow *lho*. Banyak juga pesona lain dari Sulawesi Utara yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat luas. Apa saja daya pikat Sulawesi Utara yang belum banyak diekspos media? Yuk kita intip beberapa di antaranya.

WISATA ALAM

Wisata alam telah menjadi primadona dalam beberapa tahun terakhir. Baik tua maupun muda kini beramai-ramai meninjau, mengabadikan, sekaligus memanjakan diri di sejumlah wisata alam tanah air. Beberapa lanskap alam di Sulawesi Utara berikut juga tak kalah asyik untuk dikunjungi dan dinikmati. Kira-kira seberapa jauh ya dari Balai Diklat Keuangan (BDK) Manado?

1. Air Terjun Tunan

Air terjun ini terletak di Desa Talawan, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Sumber Air Terjun Tunan berasal dari sungai di atas gunung yang mengalir cukup deras melewati tebing terjal dengan ketinggian tebing kurang lebih 80 meter. Sebelum mencapai lokasi air terjun, pengunjung diharuskan berjalan kaki sejauh kurang lebih 600 meter menuju Air Terjun Tunan. Selama perjalanan, Anda akan disuguhi suasana hutan alam yang hijau dan asri. Lokasi air terjun ini berjarak sekitar 10 km dari BDK Manado atau sekitar 30 menit berkendara.

2. Pantai Paal

Pantai ini terletak di Desa Marinsow, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten

Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Hamparan pasir putih, laut lepas, serta gulungan ombak yang memesonakan membuat pantai ini ramai dikunjungi wisatawan. Untuk memasuki area pantai, pengunjung harus membayar Rp10.000/mobil dan Rp5.000/motor. Bila Anda berminat mengunjungi pantai ini sebaiknya membawa kendaraan pribadi karena belum ada angkutan umum yang menuju lokasi. Jarak tempuh dari BDK Manado sekitar 44 km dan memerlukan waktu sekitar 1,5 jam berkendara.

3. Pulisan

Hanya berjarak sekitar 10 menit dari pantai Paal, terdapat bukit sabana indah dengan perkampungan laut yang terbentang luas. Saking indahnya, tak jarang sepasang kekasih melangsungkan foto pranikah di tempat ini. Yang istimewa dari Pulisan ini adalah perkampungan laut, pantai dengan pasir putih, serta padang sabana yang sungguh memikat.

4. Desa Rurukan

Rurukan terbagi menjadi dua wilayah yakni Desa Rurukan dan Rurukan Satu. Desa Rurukan terkenal memiliki perkebunan sayur mayur yang subur. Selain kesuburan tanah yang terlihat dari banyaknya tanaman, lokasi ini juga memberikan udara yang sejuk dan berkabut. Jika Anda datang ke sana, pastikan Anda datang sebelum fajar. Sebab, suguhan utama Desa Rurukan adalah terbitnya matahari dari balik bukit yang menawan. Dari lereng bukit ini nampak jelas Danau Tondano, Gunung Klabat, dan Selat Lembeh. Desa Rurukan berjarak sekitar 37 km dari BDK Manado atau satu jam berkendara.

Desa Rurukan
FOTO : ANDREW F. SUPIT

5. Danau Tondano

Danau Tondano adalah danau terluas di Provinsi Sulawesi Utara, yakni seluas 4.278ha/42,78 km³. Konon, danau ini berasal dari penggabungan kata Tou (suku atau warga), dan *dano* (air). Sehingga, Tondano bisa diartikan sebagai ‘suku/warga air’. Memasuki Danau Tondano, Anda akan disuguhi pepohonan rindang dan udara dingin yang menyegarkan. Di tepi danau terlihat sebuah gunung yang memiliki nama dan legenda cukup unik, Gunung Kaweng. Menurut legenda, dahulu terdapat sepasang kekasih yang tidak direstui kedua orang tuanya namun tetap bersikukuh mempertahankan hubungan mereka hingga memutuskan lari ke hutan. Akibat mengabaikan larangan orang tua mereka, meletuslah kembaran Gunung Kaweng dan menjadi Danau Tondano. Danau Tondano berjarak sekitar 47 km dari BDK Manado atau 1,5 jam berkendara.

6. Pantai Lakban

Pantai Lakban berada di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Jarak Pantai Lakban dari BDK Manado sekitar 111 km dan ditempuh sekira 3 jam 15 menit dengan kendaraan roda dua/empat. Pemandangan alam indah terhampar di hadapan mata, deretan pulau di Semenanjung Ratatotok berjajar indah di hamparan pantai.

WISATA BUDAYA

Tak hanya wisata alam, Sulawesi Utara juga memiliki wisata budaya yang tak kalah memikat. Salah satunya adalah tari Kabasaran, tarian tradisional masyarakat Minahasa. Tari Kabasaran adalah tarian perang yang dibawakan sejumlah laki-laki. Dahulu, para penari Kabasaran ini umumnya berprofesi sebagai petani atau penjaga keamanan desa.

Apabila wilayah mereka terancam diserang musuh, para penari akan berubah menjadi Waraney atau prajurit perang. Sebelum ada koloni Belanda, Waraney merupakan tentara bangsa Malesung yang menjadi ujung tombak di setiap suku

FOTO : ANDREW F. SUPIT



FOTO : DAVID S. RAHMAT



di Minahasa untuk melawan ancaman bagi bangsa Malesung, baik itu manusia ataupun binatang buas.

Dalam beberapa catatan, visi dan misi seorang Waraney begitu mulia. “*Esa Kita Peleng, Esa Woan Pawetengan Kumihit Un Posan. Taan Kita Peleng Esa Maesa Wian Untep Maasa Masaru Se Kaseke Wana Ng’Kesot*” yang dalam Bahasa Indonesia kurang lebih artinya: “Satu Kita Semua Satu Lalu Dipisahkan Tempat Karena Kebaktian Agama/Ajaran Tapi Kita Semua Satu, Satu Dalam Bersatu Menghadap Musuh Dari Luar”.

Menurut adat Minahasa, penari Kabasaran harus berasal dari keturunan sesepuh penari Kabasaran pula. Selain itu, setiap penari juga memiliki senjata yang diwariskan secara turun temurun dan digunakan saat menari. Para penari ini menggunakan kostum dari kain tenun khas Minahasa yang didominasi warna merah.

Ciri khas unik dari penari Kabasaran adalah wajahnya yang terlihat garang dengan tatapan mata yang tajam. Pada saat menari, seluruh penari akan menampilkan raut muka garang di mana tak sedikit senyum pun tersungging di bibir mereka. Bersenjatakan pedang dan tombak, para penari terlihat layaknya prajurit yang siap berperang menghancurkan musuh. Sesekali terlihat gerakan mengayunkan senjata, melompat, dan maju-mundur dengan semangat. Namun di akhir pementasan, penari melakukan gerakan-gerakan yang lebih riang, sebagai simbol pelepasan rasa amarah usai berperang.

Gerakan Tari Kabasaran ini enerjik, dinamis, dan mengikuti irama musik. Tarian dipimpin seorang pemimpin pertunjukan yang dipilih sesuai dengan kesepakatan sesepuh adat. Tarian ini diiringi alat musik pukul seperti gong, tambur, atau kolintang yang disebut dengan “Pa’ Wasalen”, sementara para penarinya disebut Kawasalan, yang memiliki arti “menari dengan meniru gerakan dua ayam jantan yang sedang bertarung”.

Seiring perkembangan bahasa Melayu di Manado, kata “Kawasalan” berubah menjadi Kabasaran, namun sama sekali tidak memiliki kaitan dengan kata “besar” dalam bahasa Indonesia. Kabasaran kini dijadikan sebagai tari penyambutan tamu dan hiburan warga Minahasa ketika menyelenggarakan pesta adat. Kawasalan/Kabasaran merupakan identitas Minahasa, bukan sekadar tari penyambutan tamu dan hiburan warga, tetapi lebih dalam kepada proses ritual dari jalan hidup seorang Waraney.



FOTO : ANDREW F. SUPIT

ARDES M. Y. SITANGGANG

MENGEJAR FAJAR

CERITA DAN FAKTA DI BALIK PENYELAMATAN BANK CENTURY

PENGARANG : METTA DHARMASAPUTRA, MUCHAMAD NAFI, PADJAR ISWARA,
PENERBIT : KATADATA.CO.ID
JUMLAH HALAMAN : XXIV + 452
TAHUN TERBIT : CETAKAN PERTAMA, NOVEMBER 2018

Bank Century menjadi perhatian utama pemberitaan media dari tahun 2008, sejak upaya *bail out* yang dilakukan oleh pemerintah, sampai pada tahun 2014. Akan tetapi, tidak banyak yang tahu asal muasal dan perkembangan Bank Century, bagaimana dinamika pengambilan keputusan untuk melakukan *bail out*, sampai dengan dampaknya pada peningkatan tensi politik. Buku “Mengejar Fajar” ini menggambarkan secara urut dari awal terbentuknya Bank Century, perjalanan sampai masuk dalam daftar bank diawasi, di-*bail out*, kemudian diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan, sampai dijual kembali dan berubah menjadi Bank Mutiara.

“Mengejar Fajar” terbagi atas 11 bab. Buku ini dibuka dengan penggambaran proses pengambilan keputusan untuk menyelamatkan -bukan menutup- Bank Century. Proses tersebut disampaikan dengan detail, lengkap dengan kutipan jalannya rapat pengambilan keputusan yang berlangsung alot. Rapat tersebut pada akhirnya memutuskan untuk melakukan *bail out*. Bagian buku selanjutnya merunut kembali proses berdirinya Bank Century, sepak terjang pendiri, proses operasional perbankan, dan turun tangannya Bank Sentral (Bank Indonesia) untuk mengawasi kegiatan perbankan. Diceritakan bahwa Bank Indonesia (BI) sampai menempatkan pengawas untuk berkantor di bank tersebut. Penempatan dimaksudkan untuk membuka semua praktek bisnis tidak etis yang dilakukan bank tersebut. Sayangnya, buku ini menceritakan bahwa pengawas tersebut tidak menjadi perhatian karena

dalam perjalanannya petugas tersebut akhirnya dipindahkan dan diberhentikan.

Bangkrutnya Lehman Brothers di Amerika Serikat membuat industri keuangan bergolak dan mempengaruhi secara global, termasuk Indonesia. Bank Indonesia dan Pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan melakukan manajemen krisis sampai siaga satu dengan memonitor kondisi keuangan selama 24 jam penuh. Perbankan mengalami tekanan, ada 13 bank yang ditengarai akan bermasalah, sehingga BI langsung berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengadakan rapat dan mengambil keputusan untuk menjaga kestabilan industri keuangan di Indonesia.

Bagian buku selanjutnya menggambarkan bagaimana keputusan yang diambil oleh KSSK dikritik dan dipermasalahkan. Tensi politik memanas dan terjadi eskalasi sebagai akibat dari pengambilan keputusan *bail out*. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan untuk menyelidiki kasus Bank Century tersebut. Akan tetapi, dengan dinamika politik dan perkembangan yang terjadi, akhirnya tensi politik menurun, dimana perkembangannya membuahkan hasil manis seperti yang diceritakan di akhir buku.

“Mengejar Fajar” merupakan suatu buku yang sangat menarik untuk dibaca. Penjabaran secara naratif deskriptif tergambar dengan jelas sehingga pembaca mudah memahami, seolah-olah menonton film dokumenter tapi dalam bentuk



teks. Penggambaran setiap pelaku/saksi sejarah, diselingi kutipan rapat, notulensi, pemberitaan, dan hasil wawancara dilakukan runut dan sangat jelas. Catatan kaki yang lengkap dan lampiran hasil temuan BPK memperkaya isi buku ini. Tidak perlu pengetahuan yang dalam di bagian ekonomi, perbankan, ataupun keuangan untuk memahami buku ini. Sebagaimana catatan editornya, buku ini dibuat dari kesimpulan berbagai macam latar belakang, disajikan berdasarkan data dan fakta. Meskipun dapat melahirkan beragam kesimpulan dari berbagai orang, yang penting datanya sama. Buku ini tidak mengejar keaktualan dan kehangatan, tapi mengarah kepada *the lessons to be learned*.

FOTO OLEH BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR

Makassar

MENIKMATI HEMBUSAN LEMBUT ANGIN MAMMIRI



TANJUNG LAYAR PUTIH
FOTO : AHMAD CHABIB NURSALIM



PELABUHAN PAOTERE MAKASSAR.
FOTO : AHMAD CHABIB NURSALIM



PULAU SAMALONA MAKASSAR
FOTO : AHMAD CHABIB NURSALIM

CENTRE POINT OF INDONESIA.
KAWASAN REKLAMASI DI PANTAI LOSARI
MAKASSAR
FOTO : LUQMAN HAKIM



RAMMANG-RAMMANG
FOTO : LUQMAN HAKIM



KANG EDU

CERITA & ILUSTRASI : BIMO ADI

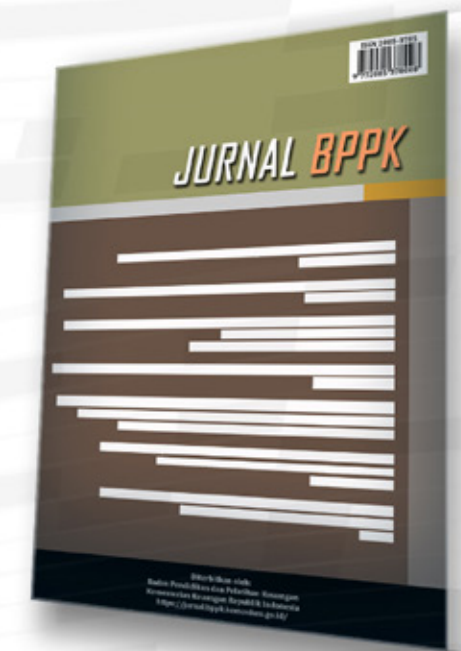


Telah Terbit!

JURNAL BPPK

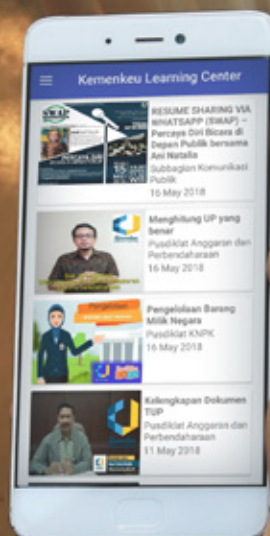
Volume 1 No.1 2018

ISSN 2085-3785



Anda dapat membacanya di:
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk>

Belajar keuangan negara
Kapan saja &
Di mana saja



KLC klc.kemenkeu.go.id
KEMENKEU LEARNING CENTER

ISSN: 2086-4833



9 772086 483008